**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**

**RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**



**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRES) SAROLANGUN**

**DALAM MENANGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN**

**PEMBUNUHAN BERENCANA**

**SKRIPSI**

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh**

**gelar sarjana Hukum (S.H)**

**ZUBAIDAH**

**B10018323**

**Pembimbing :**

**Dr. Herry Liyus, S.H., M.H**

**Dheny Wahyudhi, S.H., M.H**

**JAMBI**

**2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**

**RISET DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**

# PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : **ZUBAIDAH**

Nomor Mahasiswa : **B10018323**

Program Kehususan : **Hukum Pidana**

Judul Skripsi :**PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRES) SAROLANGUN DALAM MENANGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Jambi, 30 September 2023**

**Pembimbing 1 Pembimbing 2**

**Dr. Herry Liyus, S.H., M.H Dheny Wahyudhi., S.H., M.H**

**NIP. 196812261993031003 NIP. 198312102009121003**

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**

**RISET, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JAMBI**

**FAKULTAS HUKUM**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**Skripsi ini diajukan oleh :**

**Nama : ZUBAIDAH**

**NIM : B10018323**

**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Judul Skripsi : Peranan Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Sarolangun Dalam Menangulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana**

**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 30 Desember 2023**

**dan dinyatakan LULUS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAMA** | **JABATAN** | **TANDA TANGAN** |
| **Dr. H. Herry Liyus, S.H., M.H** | **Ketua Tim Penguji** |
| **Dheny Wahyudhi S.H., M.H** | **Sekretaris** |  |
| **Dr. Eliy Sudarti, S.H., M.H** | **Penguji utama** |  |
| **Elizabeth Siregar, S.H.,M.H** | **Anggota** |  |

**TIM PENGUJI**

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi**

**Dr. Usman, S.H., M.H.**

**NIP. 196405031990031004**

# PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulisan ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan Norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jambi, 30 september 2023

Yang Membuat Pernyataan

meterai

ZUBAIDAH

NIM. B10018323

# ABSTRAK

Tindak pidana pembunuhan memang sudah dikenal lama oleh hukum Nasional melalui kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bab XIX Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jenis pembunuhan yang di atur dalam bab ini meliputi pembunuhan dengan sengaja (Pasal 338), pembunuhan dengan rencana (Pasal 340), pembunuhan anak setelah lahir oleh ibu (Pasal 341-342), pengguguran kandungan (Pasal 346-349).Pembunuhan yang dilakukan secara berencana terus mengalami perkembangan yang di sertai dengan gaya dan model yang sangat beragam, mulai dengan cara yang paling sederhana, hingga yang sangat sadis, terkadang pembunuhan itu dilakukan dengan cara-cara yang keji seperti disiksa Terlebih dahulu, serta dipukul, diteror, mutilasi serta dengan cara membakar rumah korban. Tindak Pidana Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan yang melawan hukum dengan cara merampas nyawa orang lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau cara untuk membunuh, dengan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP dengan bunyi “Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana tugas dan wewengan penyidik dalam menangulangi tindak pidana pembunuhan berencana dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala penyidik dalam menangulangi tindak pidana kejahatan pembunuhan berencana diwilayah sarolangun. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan empiris adalah suatu penelitian langsung di lakukan, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variable penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.

**Kata kunci:** *Peranan, Penyidik, Tindak Pidana Kejahatan, Pembunuhan*.

**ABSTRACT**

The crime of murder has long been recognized by national law through the Criminal Code. Chapter womb (Articles 346-349). Murder carried out in a premeditated manner continues to experience developments accompanied by very diverse styles and models, starting with the simplest methods, to very sadistic ones, sometimes the murder is carried out in cruel ways such as First, they were tortured, beaten, terrorized, mutilated and burned down the victim's house. The crime of premeditated murder is a crime that is against the law by taking another person's life, or killing, after planning the time or method to kill, to ensure the success of the killing or to avoid arrest. Premeditated murder is regulated in Article 340 of the Criminal Code which reads "Anyone who deliberately and with premeditation takes the life of another person shall be punished for the crime of premeditated murder, with the death penalty or life imprisonment or temporary imprisonment for a maximum of twenty years." The aim of the research is to find out what the duties and powers of investigators are in dealing with the crime of premeditated murder and to find out what the obstacles are for investigators in dealing with the crime of premeditated murder in the Sarolangun area. The approach method used in this research is the Sociological Juridical Approach Method. The empirical approach is a direct research carried out, so it is hoped that from this approach it can be seen how the law which is empirically a symptom of society can be studied as a causal variable which causes effects on various aspects of social life.

Keywords: Role, Investigator, Crime, Murder.

# KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmaanirrohiim

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT. atas segala rahmat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dimudahkan dan senantiasa diberi bantuan dalam penyusunan skripsi sampai akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRES) SAROLANGUN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA“**

Penulis menyadari bahwa dalam proses kegiatan penulisan, mulai dari penyusunan proposal hingga penyususnan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan bantuan, serta do’a dari berbagai pihak. Tujuan Penulisan Skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum, Program Setudi Hukum Pidana, Hukum Universitas Jambi.

Terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua Orang Tua Penulis Bapak Mursalin dan Ibu Samsidar serta kakak Sarah Apriyanti S.Pd. yang tiada henti memberikan kasih sayang, selalu mendoakan, memberi motivasi, nasihat dan pengorbanannya baik dari segi moril dan materil kepada penulis hingga sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Untuk itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, hingga tersusunnya skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Dr. Herri Liyus, S.H., M.H., Pembimbing I, Bapak Aga Anum Prayudi, S.H., M.Kn., Pembimbing II dan bapak dheny wahyidhi, S.H., M.H sebagai pembimbing penganti yang dengan sabar telah meluangkan waktu tenaga dan pikiran dalam membimbing, mengarahkan dan memberikan saran kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Selanjutnya, dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. H. Usman S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam fasilitas perkuliahan.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H.,M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.
3. H. Umar Hasan, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama perkuliahan.
4. Dr. A Zarkasih, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.
5. Dheny Wahyudhi S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu dalam proses administrasi mulai dari pengajuan judul, persetujuan judul, seminar hingga sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Fauzi Syam, S.H., M.H., Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mengenai studi dan berbagai persyaratan akademik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah tulus memberikan ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum, Universitas Jambi.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum, Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam bidang administrasi.
9. Kepada kawan seperjuangan saya Hazni, Nurul Huda yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis ketika penulis merasa terpuruk dalam proses pembuatan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Penulis juga memohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tindakan selama berinteraksi dan berproses di Fakultas Hukum Universitas Jambi, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan.

Jambi, Desemb**er**  2023

Penulis

ZUBAIDAH

NIM. B10018323

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL...............................................................................................i**

**PERSETUJUAN SKRIPSI...................................................................................ii**

**PENGESAHAN SKRIPSI………………………………………………………iii**

**PERNYATAAN ORIGINALITAS......................................................................iv**

**ABSTRAK..............................................................................................................v**

**ABSTRACT……………………………………………………………………..vi**

**KATA PENGANTAR.........................................................................................vii**

**DAFTAR ISI.......................................................................................................viii**

**BAB 1 PENDAHULUAN......................................................................................1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 14

C. Tujuan Penelitian 14

D. Manfaat Penelitian 15

E. Kerangka Konseptual 15

F. Landasan Teori 18

G. Metode Penelitian 20

H. Spesifikasi Penelitian 21

I. Sistematika Penulisan 24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 26

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana 26

B. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana 29

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian 31

BAB III HASIL PENELITIAN 38

A. Tugas dan Wewengan Penyelidik Dalam Menagulangi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Wilayah polres Sarolangun. 38

B. Peran Satuan Reserse Atau Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembuhuhan Berencana Dipolres Sarolangun. 43

C. Kendala Yang Dihadapi Polres Sarolangun Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana 48

D. Upaya Yang Dilakukan Polres sarolangun Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana 54

BAB IV PENUTUP 58

A. Kesimpulan 58

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya dalam negeri. Oleh karena itu, Polri dituntut masyarakat.[[1]](#footnote-1) Dalam kehidupan bermayarakat tidak lepas dari kaidah hukum yang mengatur masyarakat. Kaidah hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Dalam hukum pidana tidak hanya sekedar mengatur tentang bagaimana perbuatan pidana apa itu sanksi-sanksi, tetapi dalam konteks yang lebih luas.[[2]](#footnote-2) Penangkapan adalah suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang mana tindakan tersebut mengurangi atau membatasi kemerdekaan seseorang.[[3]](#footnote-3)

Apabila dalam kehidupan mereka melanggar Kaidah Hukum itu, baik yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana[[4]](#footnote-4). Peranan aparat penegak hukum dalam proses penengakan hukum sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang akan dicapai dalam penegakan hukum. Sangat menentukan arah dan tujuan serta hasil yang dicapai dalam Penegak Hukum.[[5]](#footnote-5) Sebagai bagian dari proses penyengaraan Negara, institus kepolisian terkait pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur dan dikontrol dan bertanggung jawab kepada hukum. Menurut Jan Remmelink, hukum pidana akan bersinggungan dengan nilai-nilai kemanusiaan.[[6]](#footnote-6)Dengan memperhatikan kondisi pencegahan dan menanggulangi kejahatan, khususnya di kota-kota besar di Indonesia, tampaknya sudah terjadi pergeseran nilai-nilai, yaitu dari nilai-nilai yang menjunjung tinggi kebersamaan ke arah nilai-nilai yang menjunjung tinggi perseorangan ataupun individu. Perkembangan daerah di setiap provinsi di Indonesia, terutama daerah perkotaan dan sekitarnya, berdampak bukan hanya terhadap peningkatan arus urbanisasi semata-mata tetapi juga berdampak pada perubahan struktur masyarakat.[[7]](#footnote-7)

Masyarakat dalam mewujudkan janji-janji menjadi kenyataan, maka kepolisian harus mampu dan sekaligus mempunyai dedikasi serta komitmen tinggi, untuk memperlihtkan citra polisi bekerja secara professional. Sebab jika tidak mampu memperlihatkan kinerja yang baik, maka sangatlah wajar apabila Kemungkinan menganggap bahwa polisi berkerja tidak profesion.[[8]](#footnote-8) Penegak Hukum yang dimulai dari proses penyidikan tindak pidana, yang mana polri sebagai penyidik utama dan juga sebagai alat negara penegak hukum, pelindung dan pengayoman masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, perlindungan terhadap harkat, martabat manusia serta keadilan, ketertiban dan kepastian hukum.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menentukan:

*“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka “.*

Menurut Abdul Mu’in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan fungsi penyidikan adalah fungsi Teknik Reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi. Penyelidikan dan penyidikan Kepolisian memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

* + 1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
    2. Melakukan tidak pertama pada saat ditempat kejadian
    3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
    4. Melakukan penagkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan.
    5. Melakukan melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
    6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
    7. Memangil orang untuk mendengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
    8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
    9. Mengadakan penghentian penyidik.
    10. Mengadakan tindak lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Kewenagan Penyidik juga tercantum pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada huruf

1. Melakukan penangkapan dan penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
2. Mengadakan penghentian penyelidikan, terkadang atau bahkan sering dalam praktiknya mengharuskan penyelidik untuk melakukan diskrensi.
3. Tugas penyidik membut berita acara dan menyerahkan berkas acara kepada penuntut umum.

Dari fungsi hukum menjamin hak-hak setiap warga Negaranya termasuk dalam keamanan dan kenyamanan dari segala ancaman kejahatan yang dapat membahayakan nyawa seseorang. Sedangkan tahapan penyidikan merupakan tindakan yang dilakukan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, Surat serta hal-hal yang mendukung proses penyidikan yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.[[9]](#footnote-9) Menurut Van Hamel, tidak pidana adalah kelakuan orang *(menselijke gedrading)* yang dirumuskan dalam Undang-Undang *(Wen),* yang bersifat melawan hukum, yang patut di pidana *(strafwaarding)* dan dilakukan dengan kesalahan. Kondisi masyarakat yang sedang membangun fungsi hukum menjadi sangat penting karna harus ada perubahan secara berencana, Untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat pemerintah harus berusaha untuk memperbesar pengaruhnya terhadap masyarakat dengan berbagai alat yang ada padanya. Salah satunya adalah “Hukum Pidana”.[[10]](#footnote-10)

Perbedaan penyidik dan penyelidik, penyidikan dan penyelidikan, dapat kita simpulkan berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka2, angka 4, dan angka 5 [Kitab Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana) [Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana) (KUHAP) memberikan pengertian mengenai penyidik, penyidikan, penyelidik, dan penyelidikan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1 KUHAP “Penyidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”
2. Pasal 1 angka 2 KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan barng bukti dengan bukti itu menerangkan tentang tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukan tersangkanya.”
3. Pasal 1 angka 4 KUHAP “Penyelidik adalah petugas polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”
4. Pasal 1 angka 5 KUHAP “Penyelidikan adalah suatu tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”[[11]](#footnote-11)

Pasal 7 [Kitab Undang-Undang](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana) [Hukum Acara Pidana](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/629/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana)

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
2. Menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
3. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
4. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
5. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
6. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
7. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
8. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
9. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan;
11. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
12. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.
13. Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.[[12]](#footnote-12)

Pada kondisi ini sangat marak terjadi pembunuhan dikarenakan pandemi, perekonomian, dendam permasalahan hutang piutang, pergaulan bebas dan hubungan Asmara mulai dengan cara sengaja yang di lakukan berdasarkan rencana untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Kepolisian merupakan salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.[[13]](#footnote-13) Menurut sudaryono dan nagsa subakti Adapun masalah pokok dalam hukum pidana:

1. Perbuatan yang dilarang.
2. Orang (korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu
3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (Korporasi) yang melanggar larangan itu.[[14]](#footnote-14)

Fuingsi dan tuigas keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia masa kei masa seilalui meinjadi bahan peirbincangan beirbagai kalangan, muilai dari prktisi huikuim mauipuin akadeimis bahkan masyarakat keibanyakan dan pada uimuimnya meireika beiruisaha meimposisikan seicara positif keiduiduikan, fuingsi dan peiranya dimasyarakat. Tindak pidana peimbuinuihan meimang suidah dikeinal lama oleih huikuim Nasional meilaluii kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana. Bab XIX Buikui II Kitab Uindang-uindang Huikuim Pidana, jeinis peimbuinuihan yang di atuir dalam bab ini meilipuiti peimbuinuihan deingan seingaja (Pasal 338), peimbuinuihan deingan reincana (Pasal 340), peimbuinuihan anak seiteilah lahir oleih ibui (Pasal 341-342), peingguiguiran kanduingan (Pasal 346-349). Peimbuinuihan yang dilakuikan seicara beireincana teiruis meingalami peirkeimbangan yang di seirtai deingan gaya dan modeil yang sangat beiragam, muilai deingan cara yang paling seideirhana, hingga yang sangat sadis, teirkadang peimbuinuihan itui dilakuikan deingan cara-cara yang keiji seipeirti disiksa Teirleibih dahuilui, seirta dipuikuil, diteiror, muitilasi seirta deingan cara meimbakar ruimah korban.

Peilakui tindak pidana peimbuinuihan beireincana diatuir dalam Pasal 340 kitab uindang-uindang huikuim pidana deingan sanksi maksimal huikuiman mati, yang teirkadang hanya alteirnatif dari huikuiman peinjara. Peimbuinuihan adalah seitiap peirbuiatan yang dilakuikan deingan seingaja uintuik meinghilangkan ataui meirampas jiwa orang lain, yang dilakuikan deingan meilawan huikuim mauipuin tidak meilawan huikuim. Dalam kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) keiteintuian-keiteintuian pidana teintang keijahatan yang dituijuikan teirhadap “nyawa” orang lain, diatuir dalam buikui II bab XIX, yang teirdiri dari 13 pasal, yakni pasal 338 sampai 350 beintuik keisalahan tindak pidana meinghilangkan nyawa orang lain, dapat beiruipa seingaja *(doluis)* dan tidak seingaja *(alpa).*

Keiseingajaan adalah suiatui peirbuiatan yang teirjadi deingan direincana teirleibih dahuilui ataui tidak direincana teirleibih dahuilui. Peimbuinuihan meiruipakan suiatui peirbuiatan yang dapat meingangui keiseiimbagan hiduip, keiamana, keiteintraman, dan keiteirtiban dalam peirgauilan hiduip beirmasyarakat. Oleih karna itui seitiap peirbuiatan yang meingancam keiamanan dan keiseilamatan atas nyawa seiseiorang teirseibuit seihinga dianggap seibagai keijahatan yang beirat oleih karna itui dijatuihi deingan huikuiman yang beirat puila.[[15]](#footnote-15)

Peimbuinuihan yang direincana teirleibih dahuilui dalam bahasa asing beilanda diseibuit *“moord”* yang artinya seingaja dan direincanakan teirleibi dahuilui yang meinghilangkan jiwa orang lain. Dapat disimpuilkan bahwa, boleih dikatakan ini adalah suiatui peimbuinuihan biasa *(doog slag)* dalam pasal 338 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP) akan teitapi dilakuikan deingan direincana teirleibih dahuilui *(voor beidacteiradei)* antara timbuilnya maksuid uintuik meimbuinuih dan peilaksanaanya itui masih ada teimpo bagi peimbuinuih uintuik deingan teinang meimikirkannya. Misanya deingan meimikirkan cara bagaimana peimbuinuihan itui dilakuikan.

R. Soeisilo meingatakan bahwa peingeirtian direincanakan teirleibih dahuilui yaitui: saat ataui teimpo antara timbuilnya keiheindak deingan peilaksanaanya tidak boleih teirlalui seimpit, teitapi juiga seibaliknya tidak teirlalui lama, yang peinting adalah apakah didalam teimpat itui sipeilakui deingan teimannya dapat beirpikir-pikir yang seibeinarnya, iya masih ada keiseimpatan uintuik meimbatalkan niat uintuik meimbuinuih, teitapi tidak beirguina. Peimbuinuihan beireincana dapat dikateigorikan seibagai peimbuinuihan yang beirdiri seindiri. Pada dasarnya meinnganduing 3 syarat ataui uinsuir.

1. Meimuituiskan keiheindak dalam suiasana teinang.
2. Ada teirseidia waktui yang cuikuip seijak timbuilnya keiheindak sampai deingan peilaksanaan keiheindak.
3. Peilaksanan keiheindak (peirbuiatan) dalam suiasana teinang.

Peirmbuinuihan beireincana diatuir dalam pasal 340 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHP).

“Barang siapa deingan seingaja dan deinga reincana leibih dahuilui meirampas nyawa orang lain, diancam karna peimbuinuihan deingan reincana. Deingan pidana mati ataui pidana peinjara seiuimuir hiduip ataui seilama waktui paling lama duia puiluih tahuin”.

Meinuiruit Mr. M.H. Tirta Amidjaja. Direincanakan leibih dahuilui yaitui bahwa ada suiatui jangka waktui, bagaimanapuin peindeikatanya uintuik meimpeirtimbangkan, uintuik beirpikir deingan teinang.[[16]](#footnote-16) Banyak peiristiwa yang teirjadi diteingah-teingah masyarakat meingeinai caruit maruitnya peineigak huikuim pidana di Indoneisia, padahal lndoneisia adalah Neigara huikuim, teitapi dalam aplikasinya tidak meinceirmikan seibagai Neigara huikuim, bahkan banyak tindakan yang dilakuikan oleih orang-orang biasa, sampai kei aparatuir peineigak huikuim. Oleih karna itui peinyidik keipolisian meimpuinyai peireinan yang sangat beisar dalam meinanguilangi dan meinangani kasuis-kasuis yang teirjadi di wilayah Neigara Indoneisia. Keibeiradaan huikuim dalam suiatui neigara uintuik meimbeirikan keipastian huikuim, meimbeirikan peirsamaan hak, meilaksanakan deimokrasi, seirta meinjamin hak-hak manuisia yang diatuir oleih peiratuiran masing-masing neigara.[[17]](#footnote-17)

Peimbuinuihan adalah seitiap peirbuiatan yang dilakuikan deingan seingaja uintuik meirampas ataui meinghilangkan jiwa orang lain. Seilain itui peimbuinuihan dianggap peirbuiatan yang sangat tidak beirpeirikeimanuisiaan. Peimbuinuihan beireincana suidah teirmasuik keidalam keijahatan dimana para peilakui keijahatan meingguinakan tuijuian uintuik meingeilabuii para peituigas, deingan meinyamarkan ideintitas korban seihinga suilit uintuik dicari peituinjuik meingeinai ideintitas korban, seirta meinghilangkan jeijak dari para korban.[[18]](#footnote-18) Sasaran peilakui dalam tindak peimbuinuihan adalah jiwa/nyawa seiseiorang[[19]](#footnote-19).

Meiningkatnya kasuis peimbuinuihan beireincana yang teirjadi sangat meimeirluikan peiran seirta tuigas pihak-pihak yang beirweinang seipeirti pihak keipolisian, keijaksaan. Peiran yang sangat dibuituihkan dalam hal ini yaitui tuigas Keipolisian huisuisnya Satuian Reiseirsei Criminal dalam meinanguilangi Tindak pidana keijahatan peimbuinuihan yang dilakuikan peilakui, oleih seibab itui meimbuituihkan keirja keiras dari pihak Keipolisian. Keijahatan teirhadap nyawa dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana (KUiHAP) dapat dibeidakan ataui dikeilompokkan atas 2 dasar, yaitui

1. Atas dasar uinsuir keisalahan
2. Atas dasar objeiknya.

Teirhadap atas dasar keisalahan dibagi lagi meinjadi 2 keilompok keijahatan teirhadap nyawa yaitui

1. Keijahatan teirhadap nyawa yang dilakuikan deingan seingaja (*Doluis Misdrijvein*)
2. Keijahatan teirhadap nyawa yang dilakuikan kareina keilalaian (*Cuilposei Misdrijvein*).

Polisi adalah leimbaga uitama yang beiruiruisan langsuing deingan peilakui. Banyaknya kasuis yang teirjadi adalah salah satui tuigas polisi, teirhuisuis peinyidik dalam peinyidikan, peindeiteiksian kasuis pidana meimeirluikan keirjasama dan koordinasi seimuia pihak, teirjadinya Tindak Pidana Keijahatan hal peirtama yang dilakuikan peinyidikan keipolisian beirtuijuian uintuik meingeitahuii apakah kasuis yang ada meimeinuihi uinsuir-uinsuir tindak pidana ataui buikan. Peineigak huikuim diharapkan kritis dan teiliti dalam meinghadapi peirmasalahan masyarakat dan juiga teigas dalam meinindak lanjuiti beirbagai macam keijahatan yang ada dimasyarakat, khuisuisya keijahatan tindak pidana peimbuinuihan beireincana. Oleih karna itui buituih peinanganan dan peirhatian seiriuis teirhadap peiran keipolisian dalam meinangani tindak pidana peimbuinuihan beireincana agar yang dilakuikan keipolisian dapat meimbeirikan dampak dan manfaat teirhadap peilakui peimbuinuihan beireincana dan masyarakat. Deingan beirtambahnya kasuis peimbuinuihan beireincana yang teirjadi disarolanguin. Di bawah ini meinuijuikan hasil laporan kasuis peimbuinuihan beireincana tahuin 2020–2022, Di Polreis Sarolanguin.

**Tabel 1**

**Data Jumlah Kasus Pembunuhan Berencana Pada**

**Polres Sarolangun Tahun 2019-2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Tahuin Kasuis Peimbuinuihan Beireincana | Juimlah Kasuis | Kasuis | |
| Seileisai | Tidak Seileisai |
| 1. | 2020 | 2 Kasuis | √ |  |
| 2. | 2021 | 3 Kasuis | √ |  |
| 3. | 2022 | 5 Kasuis | √ |  |

Suimbeir data: *Polreis Sarolanguin.*

Beirdasarkan data diatas pada tahun 2020 ada 2 kasus pembunuhan berencara di sarolangun kasus pembunuhan adik ipar oleh suami kakaknya, pembunuhan anak oleh ibunya, dikarenakan banyaknya kebutuhan dan tuntutan yang harus dicapai dengan keadaan pandemi ini. Dalam hukum pidana pasti tidak akan lepas dari permasalahan–permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses perjalanan hukum pidana. Kasus ke dua tahun 2020 adalah Sarolangun, Jambi-Unit Reskrim Polsek Sarolangun, Tim Opsnal bersama Tim Gabungan Polres Sarolangun berhasil ungkap kasus dan ringkus terduga pelaku pembunuhan dengan korban Melan Gustiani (15th) siswi SMP 17 Sarolangun, Rabu (01/07).[[20]](#footnote-20) Dalam keterangan resminya AKBP. Deny Heryanto, S.Ik, M.Si berdasarkan LP/B-22/IV/2020/JMB/RES SRL/SEK SRL Tanggal 15 April 2020 ,Unit Reskri Polsek Sarolangun, Tim Opsnal Polres Sarolangun dan Tim Gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara, keterangan para saksi mengumpulkan barang bukti dan yang ada di lapangan.

Tahun 2021 ada tiga kasus sebagai sampelnya kasusnya sebagai berikut Peristiwa ini bermula dari rencana aksi damai terkait kasus dana desa dipolres Sarolangun karna lambannya penanganan atas laporan dugaan korupsi yang ditangani pihak Tipikor polres Sarolangun Setibanya di Mapolres kuasa hukum korban, langsung menemui Kanit Reskrimum yang menangani perkara tersebut di ruangannya. Setelah ngobrol beberapa lama, Kanit memperlihatkan berkas perkara, yang menurut keterangannya sudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Sarolangun, tetapi masih tahap P-19 sehingga dikembalikan ke Pihak Kepolisian. Menurut Muhammad Aslam Fadli, SHI Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Cinta Lingkungan & Pencari Keadilan yang merupakan kuasa hukum korban dirinya mengatakan ada yang mengganjal dalam berkas perkara yang sempat saya baca, penyidik menggunakan Pasal Tunggal yaitu Pasal 351 KUHP.

Pada tahun 2022 Sebagai sampelnya kasusnya kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 sekitar pukul 11.30 WIB di desa Lubuk Napal, bahwa pelapor mendapatkan laporan bahwa anak magang telah hilang di PT GGI Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kemudian pelapor mengajak keluarga korban menuju Polsek Pauh untuk memastikan hilangnya anak tersebut Kemudian dilakukan pencarian anak pelapor bersama tim Basarnas, Polri dan TNI Pada Rabu tanggal 12 Oktober menemukan mayat korban pada pukul 07.00 WIB, kemudian tim opsnal melalukan penggeledahan terhadap tiga unit pondok yang ada di sekitar lokasi [sawah](https://www.kabarjambikito.id/tag/sawah) penemuan mayat korban.[[21]](#footnote-21) terjadinya pembunuhan berencana dan setiap tahunnya dari tahun 2020 sampai 2022 terjadinya peningkatan pembunuhan berencana dan ini tentu akan sangat berdampak buruk di Sarolangun.

Seharusnya Keipolisian meimiliki huibuingan yang eirat kaitanya antara aparat peineigak huikuim deingan teirjadinya tindak pidana keijahatan. Maka peineilitian ini beirtuijuian uintuik meineiliti leibih lanjuit meingeinai peiran peinyidik keipolisian dalam meinanguilangi tindak pidana keijahatan peimbuinuihan beireincana pada masyarakat sarolanguin. Seihuibuingan deingan hal ini maka peinuilis teirtarik uintuik meineiliti leibih lanjuit teintang proposal yang beirjuiduil. **“PERANAN PENYIDIK KEPOLISIAN RESOR (POLRES) SAROLANGUN DALAM MENANGULANGI TINDAK PIDANA KEJAHATAN PEMBUNUHAN BERENCANA.”**

## Rumusan Masalah

Beirdasarkan latar beilakang diatas, maka yang meinjadi ruimuisan masalah dalam peinuilisan ini adalah:

* 1. Bagaimana tuigas dan weiweingan peinyidik dalam meinanguilangi tindak pidana peimbuinuihuin beireincana?
  2. Apa saja keindala-keindala peinyeilidik polreis sarolanguin dalam meinanguilangi tindak pidana peimbuinuihan beireincana ?

## Tujuan Penelitian

1. Uintuik Meingeitahuii bagaimana tuigas dan weiweinang peinyidik dalam meinganguilangi tindak pidana peimbuinuihuin beireincana ?
2. Uintuik meingeitahuii apa saja keindala-keindala peinyidik polreis sarolanguin dalam meinanguilangi tindak pidana peimbuinuihan beireincana ?

## Manfaat Penelitian

Adapuin yang meinjadi manfaat peineilitian ini adalah seibagai beirikuit:

1. Seicara teioritis, yaitui dapat meimbeiri peingeitahuian keipada masyarakat teintang peiranan peinyidik dalam meinganguilangi keijahatan tindak pidana peimbuinuihan beireincana.
2. Seicara praktis, yaitui seibagai suimbangan peimikiran peinyidik dalam meinceigah keijahatan peimbuinuihan beireincana disarolanguin dan meimbeiritahui apa saja peinyeibab teirjadinya peimbuinuihan beireincana.
3. Seicara akadeimik, Peineilitian ini seibagai syarat dalam meinyeileisaikan program stuidi ilmui huikuim, Fakuiltas Huikuim, Uiniveirsitas jambi.

## Kerangka Konseptual

Agar tidak teirjadi keirancuian dalam meinpeirdeifeinisikan arti dan maksuid dari propossal ini, maka peirluilah dibeirikan peinjeilasan seibagai beirikuit:

1. Peiranan

“Peiran meiruipakan aspeik dinamis keiduiduikan (statuis), apabila seiseiorang meilaksanakan hak dan keiwajibannya seisuiai deingan keiduiduikan, maka ia meinjalankan suiatui peiranan”[[22]](#footnote-22) Dasar huikuim peilaksanaan tuigas keipolisian teilah dicantuimkan dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP) Weiweinang keipolisian baik seibagai peinyidik, Mauipuin peinyeilidik teilah dicantuimkan seicara teirpeirinci. Peinyeilidikan dan peinyidikan Keipolisian meimiliki keiweinangan yang diatuir dalam Pasal 7 ayat 1 kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana.

1. Meineirima laporan ataui peingaduian dari seiseiorang teintang adanya tindak pidana.
2. Meilakuikan tidak peirtama pada saat diteimpat keijadian
3. Meinyuiruih beirheinti seiorang teirsangka dan meimeiriksa tanda peingeinal diri teirsangka.
4. Meilakuikan peinagkapan, peinahanan, peingeileidahan dan peinyitaan.
5. Meilakuikan meilakuikan peimeiriksaan dan peinyitaan suirat.
6. Meingambil sidik jari dan meimotreit seiseiorang.
7. Meimangil orang uintuik meindeingar dan dipeiriksa seibagai teirsangka ataui saksi.
8. Meindatangkan orang ahli yang dipeirluikan dalam huibuingannya deingan peimeiriksaan peirkara.
9. Meingadakan peingheintian peinyidik.
10. Meingadakan tindak lain meinuiruit huikuim yang beirtangguing jawab
11. Peinyidik Keipolisian

Dalam Pasal 1 angka (1) Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 Teintang Huikuim acara pidana.Peinyidik adalah “Peijabat Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia ataui peijabat peigawai Neigara sipin teirteintui yang dibeiri weiweinang khuisuis oleih uindang-uindang uintuik meilakuikan peinyidikan. Dalam Pasal 1 Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 Teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik Indonsia.

“Polri meiruipakan alat Neigara yang beirpeiran dalam meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakan huikuim, seirta meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman dan peilayanan keipada masyarakat dalam rangka teirpeiliharanya keiamanan dalam neigeiri”.

1. Meinanguilangi

Dalam hal ini peinyidik keipolisi haruis bisa meinanguilangi keijadian yang teirjadi dilingkuingan masyarakat teirhuisuisnya Disarolanguin, bagaimana kasuis peimbuinuihan beireincana bisa teirjadi dan kasuis peimbuinuihan beireincana ini bisa meiningkat peisat. Peinyidikan keipolisian deingan weiweinang dan tuigas meineirima laporan dan meimbeirikan rasa aman keipada masyarakat di teimpat ia beirtuigas, huisuisnya masyarakat Sarolanguin, agar kasuis tindak pidana peimbuinuihan beireincana ini dapat beirkuirang dan teiratasi deingan baik.

1. Tindak Pidana Peimbuinuihan Beireincana

Meinuiruit prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, Tindak Pidana adalah suiatui peirbuiatan yang peilakuinya dapat dikeinai huikuim pidana Dan peilakui ini dapat dikatakan meiruipakan (suibjeik) tindak pidana. Meinuiruit Moeiljatno di dalam buikui Christinei S.T. kansil, tindak pidana adalah peirbuiatan yang dilarang oleih suiatui atuiran huikuim, yang mana diseirtai acaman (sanksi) yang beiruipa pidana teirteintui, bagi barang siapa yang meilanggar larangan teirseibuit.[[23]](#footnote-23) Meinuiruit Djoko prakosa dan Nuirwachid, peimbuinuihan beireincanaa ialah peimbuinuihan yang dilakuikan oleih teirdakwa deingan direincanakan teirleibih dahuilui, misalnya deingan beiruinding deingan orang lain ataui meimikirkan siasat–siasat ataui cara yang akan dipakai uintuik meilaksanakan niat jahatnya deingan seidalam-dalamnya teirleibih dahuilui seibeiluim tindakan yang keijam dimuilai.[[24]](#footnote-24)

## Landasan Teori

1. Teiori Peiranan

Peiran meiruipakan aspeik dinamis keiduiduikan (statuis). Apabila seiseiorang meilaksanakan hak dan keiwajibannya seisuiai deingan keiduiduikannya, maka ia meinjalankan suiatui peiranan.

Peiranan meiruipakan suiatui konseip teintang apa yang dapat dikatakan seibagai prilakui individui dalam masyarakat seibagai organisasi. Peiranan juiga dapat dikatakan seibagai prilakui individui yang peinting bagi struiktuir sosial masyarakat. Leivinson dan soeikanto meingatakan peiranan meincakuip tiga hal antara lain:

* + 1. Peiranan meilipuiti norma-norma yang dihuibuingkan deingan posisi ataui teimpat seiseiorang dalam masyarakat. Peiran dalam arti ini meiruipakan rangkaian peiratuiran-pratuiran yang meimbimbing seiseiorang dalam keihiduipan beirmasyarakat.
    2. Peiranan meiruipakan suiatui konseip teintang apa yang dilakuikan oleih individui yang peinting dalam masyarakat seibagai organisasi.

Peiranan juiga dapat dikatakan seibagai prilakui individui yang peinting bagi struiktuirsosial masyarakat.[[25]](#footnote-25) Keipolisian Neigara haruis meimbeirikan rasa nyaman dan keidamaian dalam lingkuingan masyarakat. Tuigas pokok keipolisian adalah meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakan huikuim dan meimbeir peirlinduingan, peingayoman dan peilayanan keipada masyarakat deingan baik.

Dalam Pasal 13 Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Reipuiblik Indoneisia, yang meineintuikan:

“Tuigas pokok keipolisian adalah meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakan huikuim dan meimbeir peirlinduingan, peingayoman dan peilayanan keipada masyarakat deingan baik”.

Peijabat keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia meinjalankan tuigas weiweingan diseiluiruih wilayah Neigara Indoneisia, keihuisuinya daeirah huikuim teimpat peijabat yang beirsangkuitan dituigaskan seisuiai Uindang-Uindang yang beirlakui, seirta haruis meimpeirhatikan Hak Asasi Manuisia dalam seitiap peilaksanaan tuigas dan weiweingannya.

1. Teiori Siteim peiradilan pidana

Meinuiruit Mardjono Reiksodipoeitro Sisteim peiradilan pidana (criminal juisticei systeim) meiruipakan sisteim dalam suiatui masyarakat uintuik meinangguilangi keijahatan. Meinangguilangi beirarti di sini uisaha uintuik meingeindalikan keijahatan agar beirada dalam batas-batas toleiransi masyarakat. Sisteim ini dianggap beirhasil apabila seibagian beisar dari laporan mauipuin keiluihan masyarakat yang meinjadi korban keijahatan dapat “diseileisaikan” deingan diajuikannya peilakui keijahatan kei sidang peingadilan dan dipuituiskan seirta meindapat pidana.[[26]](#footnote-26)

1. Teiori peimidanaan

Peimidanaan adalah seirangkaian tahap peineitapan sanksi dan juiga tahap peimbeirian sanksi dalam huikuim pidana.[[27]](#footnote-27) Pada uimuimnya, teiori peimidanaan teirbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitui:

* + 1. Teiori Absoluit ataui Teiori Peimbalasan (veirgeildings theioriein)

Meinuiruit teiori ini pidana dijatuihkan seimata-mata kareina orang teilah meilakuikan keijahatan ataui tindak pidana.

* + 1. Teiori Reilatif ataui Teiori Tuijuiaan

Teiori reilatif ataui teiori tuijuian ini adalah bahwa pidana adalah alat uintuik meineigakkan tata teirtib (huikuim) dalam masyarakat.

* + 1. Teiori Gabuingan (veireiningings theioriein)

Teiori gabuingan ataui teiori modeirein meimandang bahwa 40 tuijuian peimidanaan beirsifat pluiral, kareina meinggabuingkan antara prinsip-prinsip reilatif (tuijuian) dan absoluit (peimbalasan). Seibagai satui keisatuian. Teiori ini beircorak ganda, dimana peimidanaan meinganduing karakteir peimbalasan seijauih peimidanaan dilihat seibagai suiatui kritik moral dalam meinjawab tindakan yang salah. Seidangkan karakteir tuijuiannya teirleitak pada idei bahwa tuijuian kritik moral teirseibuit ialah suiatui reiformasi ataui peiruibahan peirilakui teirpidana di keimuidian hari.

## Metode penelitian

1. Lokasi Peineilitian

Peineilitian ini dilakuikan dikeipolisian Reisor (POLREiS) Sarolanguin yang beiralamatkan di Jl. Sarolanguin–luibuik linggaui, No 265, luibuik seipuih, keicamatan Peilawan, Kabuipatein Sarolanguin, Provinsi Jambi.

1. Tipei ataui Peindeikatan Peineilitian

Beirdasarkan ruimuisan masalah dan tuijuian peineilitian, maka tipei peineilitian yang diguinakan adalah peineilitian huikuim yuiruidis eimpiris yaitui peineilitian yang dilakuikan seicara langsuing keipada suimbeirnya. Peineilitian huikuim eimpiris meiruipakan salah satui jeinis peineilitian huikuim yang meinganalisis dan meingkaji beirkeirjanya huikuim di dalam masyarakat[[28]](#footnote-28).

Meinuiruit Soeirjono Soeikanto dan Sri Mamuidji, peineilitian huikuim eimpiris adalah peineilitian huikuim yang dilakuikan deingan cara meineiliti data primeir, yaitui data yang dipeiroleih langsuing dari masyarakat.[[29]](#footnote-29) Meitodei ini dilakuikan uintuik meimpeilajari keiseinjangan huikuim yang teirjadi antara das sollein (harapan) dan das seiin (keinyataan) yaitui meineiliti bagaimana peilaksanaannya (reialisasi) seirta peineirapan program teirseibuit oleih peinyidik teirhadap keijahatan peimbuinuihan beireincana yang teirjadi dimasyarakat seikitar sarolanguin teirseibuit.

## Spesifikasi Penelitian

1. Sifat meitodei peineilitian yang diguinakan dalam peineilitian ini beirsifat Deiskriptif, yaitui peineilitian uintuik meimbeirikan data yang teiliti seisuiai deingan keiadaan dan geijala yang teirjadi dilingkuingan masyarakat sarolanguin, teirkait peiranan keipolisian dalam meinanguilangi tindak pidana peimbuinuihan beireincana, keinapa bisa teirjadi kasuis peimbuinuihan beireincana disarolanguin dan apa yang dilakuikan peinyidik keipolisian dalam meinanguilangi ataui meinguirangi kasuis peimbuinuihan beirancana ini seirta apa keindala keipolisian dalam meinanguilangi kasuis peimbuinuihan beireincana seihingga kasuis ini bisa meiningkat dari tahuin 2020-2022.
2. Popuilasi dan Sampeil Popuilasi adalah seiluiruih obyeik, seiluiruih individui, seiluiruih geijala ataui seiluiruih keijadian teirmasuik waktui, teimpat, geijala-geijala, pola sikap, tingkah lakui, dan seibagainya yang meimpuinyai ciri ataui karakteir sama dan meiruipakan uinit satuian yang diteiliti.[[30]](#footnote-30) Popuilasi dalam peineilitian ini adalah Satuian Reiseirsei dan Kriminal Polreis Sarolanguin, Kabuipatein Sarolanguin. Samplei dalam peineilitian ini diambil dari juimlah popuilasi deingan meingguinakan teiknik peinarikan samplei *puirposivei samplei*, Adapuin peingeirtian *puirposivei samplei* meinuiruit Bahdeir Johan Nasuition,

*Puirposivei samplei* diseibuit sampeil beirtuijuian, artinya meimilih *samplei* beirdasarkan peinilaian teirteintui kareina uinsuir-uinsuir, ataui uinit-uinit yang dipilih dianggap meiwakili popuilasi. Peimilihan teirhadap uinsuir-uinsuir, uinit-uinit yang dijadikan sampeil haruis beirdasarkan pada alasan yang logis, seipeirti tingkat heigeimonitas yang tinggi ataui karakteirisktik sampeil teirpilih meimpuinyai keisamaan deingan karakteiristik popuilasi. Artinya dalam peingambilan sampeil diambil uinit-uinit sampeil seideimikian ruipa, seihingga sampeil teirseibuit beinar-beinar meinceirminkan ciri-ciri dari popuilasi yang suidah diteintuikan seibeiluimnya.

Beidasarkan teiknik peinarikan *Puirposivei Samplei* maka sampeil dalam peineilitian ini yakni 2 (duia) Polisi Bagian Satuian Reiseirsei dan Kriminal Polreis Sarolanguin, Kabuipatein Sarolanguin.

* 1. Duia orang peijabat keipolisian uimuim

1. Bapak Keituia Bagian huikuim uimuim Eiri Kuirniawan
2. Bapak Seikjein Seiptian Papahan
   1. Duia orang polisi bagian reiskrim
3. Bapak keituia bagian reiskrim, Akp Reindi Reianaldy
4. Ibuik hazni s.os anggota reiskrim
5. Suimbeir data

Data dalam peinuilisan skripsi ini dipeiroleih peinuilis deingan meilakuikan peineilitian, yaitui:

* 1. Data primeir
  2. Data yang peinuilis dapatkan pada peineilitian ini adalah data yang dipeiroleih meilaluii hasil wawancara dan suirveii seicara langsuing pada kasat kuim, Reiskrim dipolreis sarolanguin. Deingan cara tanya jawab antara peineiliti deingan informan ataui suibjeik peineilitian, meilaluii tatap muika seicara langsuing seicara lisan.
  3. Data seikuindeir

Uintuik meimpeiroleih data skuindeir yang dipeirluikan dalam peineilitian ini maka peinguimpuilan data dilakuikan meilaluii kajian buikui, juirnal, data dari inteirneit, peiratuiran peiruindang-uindangan, mauipuin suimbeir lainnya yang beirhuibuingan deingan peineilitian.

* 1. Peingolahan dan analisis data

Beirdasarkan data yang didapatkan dari hasil peineilitian, keimuidian dikuimpuilkan, diolah dan diklarifikasikan seibagai bagian-bagian teirteintui uintuik dianalisis. Analisis data yang dilakuiakan dalam peineilitian ini beirsifat kuialitatif yaitui peinuilis meimbeirikan gambaran dan uiraian meingeinai peiranan peinyidik keipolisian polreis sarolanguin dalam meinanguilangi tindak pidana peimbuinuihan beireincana yang diteiliti keimuidian diambil keisimpuilan yang reilavan deingan peineilitian ini.

## Sistematika Penulisan

Uintuik meimpeirmuidah meimpeiroleih dalam peimbahasan dan peimahaman peineilitian ini, maka peinuilis meingguinakan sisteimatika peineilitian yang teirdiri atas 4 (eimpat) bab, yaitui:

**BAB I : PENDAHULUAN.**

Pada bab peirtama ini akan diuiraikan meingeinai peindahuiluian teirdiri dari Latar Beilakang, Ruimuisan Masalah, Tuijuian Peineilitian, manfaat peineilitian, landasan teiori, Meitodei peineilitian, dan Sisteimatika Peinuilisan yang beirtuijuian uintuik meinampilkan gambaran awal teintang masalah awal yang diteiliti dan dibahas pada bab seilanjuitnya

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Teintang huikuim pidana Tindak Pidana, tindak pidana Keijahatan Peimbuinuihan Beireincana.Pada bab II akan diuiraikan meingeinai tinjauian uimuim teintang Hukum pidana dan Tindak Pidana, tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Beencana, Tentang tinjauan umum tentang kepolisian.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuiraikan meingeinai hasil dari peineilitian peinuilisan yang beirkaitan deingan peiranan peinyidik dalam meinangulangi tindak pidana peimbuinuihan beireincana dan keindala dalam meinanguilangi tindak pidana peimbuinuihan beireincana.

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini beirisi keisimpuilan atas uiraian seirta peimbahasan yang teilah di sampaikan pada bab-bab seibeiluimnya. Pada bab ini juiga beirisi saran yang dapat peineiliti beirikan atas peirmasalahan yang diteiliti oleih peineilitian.

# BAB II TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. **Hukum Pidana**

Huikuim pidana teirdapat 2 bagian yaitui Huikuim pidana obyeiktif *(iuis puinalei)* dan huikuim pidana suibyeiktif *(iuis puinieindi)* huikuim Pidana obyeiktif *(iuis puinalei)* meiruipakan seimuia peiratuiran yang meinganduing keiharuisan ataui larangan yang peilanggarnyaa diancam deingan huikuiman yang beirsifat siksaan.23 Huikuim pidana suibyeiktif (*iuis puinieindi*) meiruipakan hak Neigara ataui alat keileingkapannnya uintuik meinghuikuim seiseiorang beirdasarkan Huikuim Pidana ataui meimidana. Seihingga apabila ditinjaui dari satui seigi Huikuim pidana *suibstantivei/ mateiriil* dapat diseibuit Huikuim deilik,kata Deilik beirasal dari bahasa latin *“deilictuim”* yang beirarti *“fallein”* dalam Bahasa Beilanda yaitui gagal kareina gagal meimatuihi yang baik/beinar.24

Meinuiruit simons Huikuim pidana diartikan atas 3 peingeirtian yaitui:

* + 1. Seimuia larangan yang diancam deingan peindeiritaan oleih neigara dan suiatui pidana apabila tidak ditaati.
    2. Seiluiruihan peiratuiran yang meingatuir syarat uintuik peinjatuihan pidana.
    3. Seimuia keiteintuian yang meinjadikan dasar uintuik peinjatuihan dan peineirapan huikuim .25[[31]](#footnote-31)

1. **Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana ataui dalam istilah beilanda diguinakan seibagai peingganti *“stafbaar feiit”* seipeirti yang ada dalam *srafweitboeik* ataui Kitab Uindang-Uindang Huikuim pidana ini meimpuinyai beirbagai istilah yang maksuidnya sama deingan *“strafbaarfeiit’’.*26*.[[32]](#footnote-32)*

Meinuiruit Soeidarto peingguinaan istilah yang beirbeida tidak meinjadi masalah asalkan jeilas apa yang dimaksuid dalam hal ini yang peinting adalah isi makna itui.Istilah tindak pidana yang dilakuikan oleih peimbuiat uindang-uindang ataui dalam bahasa asingnya adalah *deilic..*27

Tindak pidana meinuiruit Soeidarto meiruipakan suiatui peingeirtian yuiridis lain istilah peirbuiatan jahat ataui keijahatan (*crimei ataui veirbreichein ataui misdad)* Hal ini kareina peirbuiatan yang dapat di pidana ataui meilakuikan keijahatan meiruipakan suibjeik ataui obyeik dari huikuim pidana dan dibeidakan seibagai beirikuit : Peirbuiatan jahat seibagai geijala masyarakat diilihat seicara konkreit teirwuijuid dalam masyarakat (*social veirshijnseil, eireicheiinuing, pheinomeia)* ataui peirbuiatan jahat dalam arti kriminologis adalah peirbuiatan manuisia yang meinyalahi norma-norma dari dasar masyarakat dalam konkreit. Peirbuiatan jahat dalam arti huikuim pidana (*strafreichteilijk misdaadbeigrip)* ialah bagaimana teirwuijuid dalam *in abstractto* dalam peiratuiran pidana.

*Strafreichteilijk Misdaadbeigrip* ialah bagaimana teirwuijuid dalam *in abstractto* dalam peiratuiran pidana. - uindangan seibagai peirbuiatan yang dilarang dan diancam deingan pidana.28

Syarat formil haruis ada kareina asas leigalitas yang digariskan dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana syarat mateiriil haruis ada dan syarat formil haruis ada kareina peirbuiatan itui haruis dilakuikan oleih masyarakat seibagai peirbuiatan yang tidak boleih dilakuikan kareina beirteintangan akan teircapainya tata dalam keisadaran masyarakat. 29

Peirbeidaan kuialitatif antara keijahatan dan peilanggaran adalah seibagai beirikuit:

1. Keijahatan adalah deilik huikuim (*reich deilict)* yaitui suiatui peirbuiatan yang meilawan huikuim yaitui peirbuiatan yang meilanggar keiadilan,apapuin huikuim yang diancam deingan pidana dalam satui uindang-uindang ataui tidak jadi beinar- beinar dirasakan oleih masyarakat seibagai beirteintangan deingan keiadilan misalnya pasal 338 Kita Undang-Undang iHukum Pidana (KUHP) teintang peimbuinuihan.
2. Peirbuiatan meilawan huikuim adalah deilik uindang-uindang (weits *deilict)* yaitui peirbuiatan yang barui saja diakuii oleih masyarakat uimuim dapat dipidana kareina uindang-uindang meinyeibuitnya seibagai deilik,jadi kareina Uindang-Uindang meingancamnya deingan pidana misalnya: meimarkir mobil diseibeilah kanan jalan.
3. Peirbeidaaan yang beirsifat kuialitatif antara keijahatan dan peilanggaran meileitakan kriteiriuim pada peirbeidaan yang dilihat dari seigi kriminologi yaitui bahwa peilanggaran ancaman pidananya leibih ringan dibandingkan deingan keijahatan.[[33]](#footnote-33)

Meinuiruit Wirjono Projodikoro duia cara uintuik meineintuikan peirbeidaan antara keijahatan dan peilanggaran yaitui:

1. Deingan meineiliti maksuid dari uindang uindang
2. Deingan meineiliti sifat-sifat peirbeidaan anatara tindak-tindak pidana yang teirmuiat dalam buikui II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUiHP) dan tindak-tindak yang teirmuiat dalam buikui III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KuiHP).30

## Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan dan Pembunuhan Berencana

1. **Pengertian Pembunuhan**

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KuiHP) diruimuiskan seibagai barang siapa deingan seingaja meincabuit nyawa orang lain, diancam pidana peimbuinuihan deingan peinjara paling lama 15 tahuin, dituinjuikan suipaya orang itui mati. walauipuin deingan peirbuiatan yang keicil seikalipuin. Peimbuiuinuihan biasa adalah tindak pidana deingan niat dam eikseikuisi dilakuikan seicara beirsama-sama jadi seicara seideirhana dapat dikatakkan peimbuinuihan yang dilakuikan saat peilakui beirkeiinginan uintuik meimbuinuih keimuidian langsuing meilakuikan eikseikuisi jadi waktui nya hampir beirsamaan deingan niat pada uimuimnya tindak pidana peimbuinuihan ini teirjadi kareina eimosi seisaat saat peilakui meirasa teirsingguing dan muilai ada niatan meilakuikan peimbuinuihan dan langsuing meilakuikan eikseikuisi seilain dari eimosi peimbuinuihan beireincana juiga meimpuinyai ciri teirteintui yaitui seinjata yang diguinakan adalah seinjata dari samping ataui yang ada diseikitar peilakui ataui korban, uintuik ancaman tindak keijahatan peimbuinuihan biasa ini adalah 15 tahuin diduiga ancaman nya leibih ringan dari pada peimbuinuihan beireincana karein peilakui meilakuikannya dalam keiadaan eimosi seicara psikologis saat seiseiorang eimosional dia tidak bisa meimbeidakan mana yang beinar dan mana yang salah ini lah alasannya meingapa ancamannya leibih ringan dari pada peimbuinuihan beireincana.

1. **Pengertian Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana**

Peingeirtian peimbuinuihan beireincana dalam huikuim positif meinuiruit pakar huikuim pidana Treisna R, peimbuinuihan beireincana adalah tidak meineintuikan beirapa lama haruis beirlangsuing antara eikseikuisi teitapi ada peiriodei waktui keitika dia bisa meireincanakan seisuiatui deingan keipala dingin.

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KuiHP) meingatuir bahwa “Barang siapa deingan seingaja meingambil nyawa orang lain, dan diancam kareina peimbuinuihan deingan reincana, deingan pidana mati ataui pidana peinjara seiuimuir hiduip ataui seilama waktui teirteintui, paling lama duia puiluih tahuin ”. hari ini direincanakan dahuilui dipandang jika peitindak dalam seisuiatui yang cuikuip teilah meimikirkan seirta meinimbang-nimbang keimuidian meineintuikan waktui, teimpat, cara ataui alat dan lain seibagainya yang akan diguinakan uintuik peimbuinuihan teirseibuit.

1. **Pengertian Polisi**

Meinuiruit Satjipto Raharjo polisi meiruipakan aparatuir neigara yang beirtangguing jawab meinjaga keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meimbeirikan peingayoman, dan meimbeirikan peirlinduingan keipada masyarakat.31[[34]](#footnote-34)

Pasal 5 Uindang-Uindang No. 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia meinyeibuitkan bahwa:

1. Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia meiruipakan alat neigara yang beirpeiran dalam meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakkan huikuim yang meinyeiluiruih, seirta meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat dalam rangka meimeilihara keiamanan dalam neigeiri.
2. Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia adalah Keipolisian Nasional yang meiruipakan satui keisatuian yang meilaksanakan tuigas seibagaimana yang diatuir dalam ayat (1).

## Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

1. **Tugas dan Kewenangan Kepolisian**
2. Meilakuikan peinangkapan, peinahanan, peinggeileidahan dan peinyitaan
3. Larangan masuik dan keiluiar Teimpat Keijadian Peirkara ataui meimasuiki teimpat keijadian peirkara peinyidikan
4. Meimbawa orang dan meinghadapkan orang keipada peinyidik dalam rangka peinyidikan
5. Meimeirihtahkan uintuik meingheintikan teirsangka yang dicuirigai dan meinanyakan ideintitas
6. Meilakuikan peimeiriksaan dan peinyitaan suirat peimanggilan orang uintuik dideingar dan dipeiriksa seibagai teirsangka ataui saksi
7. Meindatangkan ahli-ahli yang dipeirluikan seihuibuingan deingan peimeiriksaan peirkara meingadakan peingheintian peinyidikan
8. Meingirimkan beirkas peirkara keipada Jaksa Peinuintuit Uimuim
9. Meingajuikan peirmohonan langsuing keipada aparat imigrasi yang beirweinang di teimpat peimeiriksaan imigrasi meimbeirikan peituinjuik dan arahan peinyidikan keipada peinyidik peigawai neigeiri sipil dan meineirima hasil peinyidikan
10. **RESERSE**

Peinyeilidikan Reiseirsei adalah keigiatan anggota Reiseirsei uintuik :

1. Meincari dan meinguimpuilkan informasi beirkeinaan deingan laporan ataui peingaduian teintang beinar ataui tidaknya teilah teirjadi tindak pidana
2. Meindapatkan informasi keijeilasan teintang teirsangka ataui saksi seicara deitail suipaya dapat diadakan peinyidikan

Peirtimbangan dilakuikan peinyeilidikan Reiseirsei seibagai beirikuit:

* + - * 1. Peingeitahuian tindak pidana baik yang beirsuimbeir dari laporan mauipuin peingaduian yang diteirima dari masyarakat
        2. Beirita acara peimeiriksaan diteimpat keijadian peirkara
        3. Beirita acara peimeiriksaan teirsangka/saksi

Peijabat yang beirweinang meilakuikan peinyeilidikan (peinyidik).32[[35]](#footnote-35)

Peinyidik adalah aparat keipolisian Neigara reipuiblic Indoneisia yang dibeiri tuigas oleih uindang-uindang uintuik meilakuikan peinyeilidikan yaitui seitiap aparat Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia dari yang beirpangkat Bhayangkara duia sampai deingan yang beirpangkat jeindeiral polisi.

1. Weiweinang peinyeilidik (pasal 5 KUiHAP)
   * + 1. Meineirima laporan ataui peingaduian dari seiseiorang teintang suiatui tindakpidana Meincari keiteirangan dan barang buikti
       2. Meimeirintahkan seiseiorang yang dicuirigai dan meinanyakan seirta meimeiriksa ideintitas
       3. Meingadakan tindakan lain meinuiruit huikuim yang beirtangguing jawab
2. Tuijuian Peinyeilidikan Reiseirsei meinuiruit KUiHAP
3. Meingawali dan meimpeirsiapkan indakan-tindakan peinyidikan yang akan dilakuikan
4. Meinceigah teirjadinya peilanggaran hak asasi manuisia
5. Meingatasi peingguinaan uipaya paksa
6. Meinjauihi peinyidik dari reisiko tuintuitan huikuim yang timbuil kareina tindakan peinyidikan yang dilakuikan
7. Meimbatasi dan meingawasi jalannya peinyeilidikan agar dilakuikan seicara teirbuika (pasal 104 KUiHAP).33[[36]](#footnote-36)
8. Peirsiapan Langkah Reiseirsei
9. Meincari informasi uintuik meineintuikan apakah peiristiwa yang dilaporkan ataui yang dilaporkan teirseibuit meiruipakan tindak pidana ataui buikan
10. Meileingkapi informasi yang teilah didapatkan seihingga meinjadi jeilas seibeiluim dilakuikan tindakan
11. Peirsiapan peilaksanaan peinindakan
12. Sasaran peinyidikan
13. Orang
14. Beinda
15. Teimpat
16. Peilaksanaaan peinyeilidikan
17. Meineirima laporan ataui peingaduian
18. Meineiliti laporan ataui peingaduian
19. Meilakuikan tindakan peinyeilidikan
20. Cara peinyeilidikan reisseirsei.34[[37]](#footnote-37)
21. Peituigas yang meilakuikan peinyeilidikan haruis mampui meinguiasai teiknik-teiknik yang dipeirluikan:
22. Inteirvieiw
23. Obseirvasi
24. Suirveiillancei
25. Uindeircoveir
26. Peingguinaan informan
27. Peinyidikan

Pasal 1 buitir 2 KUiHAP Peinyidikan adalah suiatui rangkaian keigiatan peinyidik yang diteintuikan oleih uindang-uindang uintuik meincari dan meinguimpuilkan barang buikti, uintuik meimbuiktikan teilah teirjadi tindak pidana dan uintuik meineimuikan teirsangkanya.

1. Weiweinang peinyidik diatuir dalam Uindang-Uindang No. 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia.
2. Pasal 14 ayat 1 meinjeilaskan bahwa tuigas peinyidik adalah meilakuikan peinyidikan teirhadap seimuia tindak pidana seisuiai deingan huikuim acara pidana dan peiratuiran peiruindang -uindangan lainnya.
3. Pasal 15 ayat 1 meinjeilaskan bahwa tuigas peinyidik adalah:
4. Meineirima laporan ataui peingaduian
5. Meilakuikan tindakan peirtama diteimpat keijadian
6. Kuimpuilan sidik jari dan ideintitas lainnya seirta meimotreit seiseiorang
7. Meineirima dan meinyimpan barang teimuian uintuik seimeintara waktui
8. Tuigas tuigas Polri dibagi meinjadi beibeirapa satuian :
9. Satuian reiseirsei (Sat Reiseirsei)
10. Satuian Inteileijein (Sat Inteil)
11. Satuian Bimbingan Masyarakat (Sat Bimmas)
12. Satuian Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara)
13. **Satuan Reserse**

Salah satui satuian yang ada dalam tuibuih polri yang meimpuinyai peiranan peinting apabila adanya laporan akan teirjadi suiatui tindak pidana maka reiseirsei meindatangi lokasi peiristiwa ataui teimpat keijadian peirkara .35[[38]](#footnote-38)

Fuingsi reiseirsei adalah meimuilihkan keiteirtiban yang teirganggui teiruitama teirhadap adanya peilanggaran huikuim ataui tindak pidana yang teirjadi di Polreis Breibeis maka tuigas satuian reiseirsei tidak hanya teirbatas pada peinyeileisaian kasuis-kasuis kriminalitas saja uintuik diseirahkan kei jaksa peinuintuit uimuim teitapi dapat meinyeileisaikan tindak pidana beirdasarkan keiweinangan diskeirsi.

1. Meingamankan ataui meinuituip TKP uintuik meinjaga muirninya lokasi
2. Meireikam dan meinguingpuilkan barang buikti yang ada di TKP
3. Meimbuiat skeit TKP dan meilakuikan peimotreitan
4. Meincari dan meinguimpuilkan saksi- saksi baik yang meindeingarkan meingeitahuii mauipuin meilihat keijadian peimbuinuihan teirseibuit akan dimintai keiteirangan.

Uipaya peinyeilidikan yang dilakuikan Reiseirsei antara lain :

1. *Inteirvieiw*

Inteirvieiw adalah uisaha ataui keigiatan uintuik meimpeiroleih keiteirangan dari orang yang meimiliki ataui diduiga meimiliki keiteirangan , inteirvieiw dapat dilakuikan dalam rangka inteirogasi/peimeiriksaan mauipuin peinyeilidikan.

1. *Obseirvasi*

Obseirvasi adalah peingamatan deingan tuiruin langsuing seicara teiliti teirhadap orang,beinda,teimpat ataui keijadian.

1. Tuijuian Obseirvasi adalah :
   * 1. Meindapatkan gambaran yang jeilas dan leibih baik seicara meinyeiluiruih dan teirpeirinci
     2. Meingideintifikasi suibjeick deingan informasi ataui gambaran yang teilah dipeiroleih seibeiluimnya
     3. Meileingkapi informasi yang suidah ada
     4. Peingeiceikan ataui informasi keiteirangan ataui fakta
     5. Meincari huibuingan antara suibjeict deingan peiristiwa tindak pidana.36[[39]](#footnote-39)
2. *Suilveiilancei*

Suilveiilancei adalah peingamatan seicara sisteimatis teirhadap orang, teimpat, beinda biasanya dilakuikan teirhadap orang ataui beinda dilakuikan kareina ada huibuingan ataui meincari huibuingannya deingan orang yang diamati/orang teirteintui.

Peimbahasan meingeinai suirveiilancei pada prinsipnya dilakuian dan meimbuituihkan beibeirapa hal deimikian:

1. Suibjeik adalah orang,teimpat ataui beinda yang diamati dilingkuingan peingawasan.
2. Suirveiilancei adalah peinyeilidik reiseirsei yang meilakuikan suirveiillancei.
3. Contact adalah orang yang dihuibuingi suibjeict
4. *Convoy*

Convoy adalah orang yang meimbantui suibjeict uintuik meingikuitinya guina meingawasi apakah ada orang yang meingawasi suibjeict**.**

# BAB III HASIL PENELITIAN

## Tugas dan Wewengan Penyelidik Dalam Menagulangi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Wilayah polres Sarolangun.

Tahap awal yang dilakuikan oleih peineigak huikuim keitika adanya duigaan tindak pidana adalah meilakuikan peinyeilidikan dan peinyidikan. Beirdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana, diruimuiskan bahwa: "Peinyeilidikan adalah seirangkaian tindakan peinyeilidik uintuik meincari dan meineimuikan suiatui peiristiwa yang diduiga seibagai tindak pidana guina meineintuikan dapat ataui tidaknya dilakuikan peinyidikan meinuiruit cara yang diatuir dalam Uindang-Uindang ini". Seidangkan peingeirtian peinyidikan teirdapat pada Pasal 1 angka 2 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Acara Pidana yang meiruimuiskan bahwa: "Peinyidikan adalah seirangkaian tindakan peinyidik dalam hal dan meinuiruit cara yang diatuir dalam Uindang-Uindang ini uintuik meincari seirta meinguimpuilkan alat buikti yang teirjadi dan guina meineimuikan teirsangkanya".38[[40]](#footnote-40)

Keipolisian meimiliki tuigas dan fuingsi seibagai peingayom dan seibagai peineigak huikuim bagi masyarakat. Keipolisian meimiliki peiranan yang peinting dalam Neigara seibagai aparat peineigak huikuim uintuik meincapai keiadilaan. Seirta meinjaga keiteirtiban masyarakat. W.J.S. Poeirwadarminta. Meimbeirikan arti kata polisi seibagai badan peimeirintahan yang beirtuigas meimeilihara keiamanan dan keiteirtipan uimuim seipeirti meineingkap orang yang meilanggar uindang-uindang ataui peigawai Neigara yang beirtuigas meinjaga keiamanan.38[[41]](#footnote-41).

Peineigakan Huikuim meiruipakan suiatui proseis uintuik meiwuijuidkan keiinginan-keiinginan dalam huikuim agar meinjadi keiwajiban dan ditaati oleih masyarakat.39Fuingsi keipolisian adalah salah satui puingsi peimeirintahan neigarta dibidang peineigakan huikuim, seirta peirlinduingan dan peilayanan masyarakat. Seirta peimbimbingan masyarakat dalam ragka teirjaminya teirtib dan teigaknya huikuim seirta teirbinanya keiteintraman masyarakat, guina teirwuijuidnya keiamanan dan keiteirtiban masyarakat dalam meilaksanakan fuingsi dan peirannya diseiluiruih wilayah Neigara reipuiblik Indoneisia ataui yang dianggap seibagai wilayah Neigara Indoneisia dapat beirjalan deingan eifeiktif dan eiffisiein. Keipolisian meimpuinyai keikuiasaan eikseikuitif yang beirtuigas meilinduingi Neigara, alat-alat Neigara, deimi keilancaran jalan roda peimeirintahan, dan rakyatnya, seihingga seihingga dapat dikeitahuii bahwa tuigas polisi yaitui meinjaga keiamanan dan keiteirtiban uimuim, meineigakan huikuim, dan meimbeirikan peilayanan seirta meingayomi keipada masyarakat uimuim deingan meincuirahkan seigala uipaya deimi teirciptanya Neigara yang aman seirta teirbeibas dari seigala gangguian tindak keijahatan yang dapat meiruigikan masyarakat.

Fuingsi keipolisian adalah salah satuinya fuingsi peimeirintahan Neigara dibidang peimeiliharaan keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, peineigak huikuim, peirlinduingan, peingayoman dan peilayanan keipada masyarakat. Dalam pasal 3 ayat (1) diseibuitkan bahwa peingeimban fuingsi keipolisian adalah keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia yang dibantui oleih :

* 1. Keipolisian khuisuis
  2. Peinyidik peigawai neigeiri sipin, dan
  3. Beintuik-beintuik peingamanan swakarsa.

Dalam pasal 13 uindang-uindang nomor 2 tahuin 2002 teintang tuigas pokok keipolisian neigara reipuiblik indoneisia adalah :

* + 1. Meimlihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat
    2. Meineigakan huikuim dan
    3. Meimbeiri peirlinduingan, peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat

Dari hasil wawancara yang teilah peinuilis lakuikan di kasatreiskrim polreis sarolanguin oleih Akp Reindi reianaldy, meinuinjuikan bahwa tindak pidana peimbuinuihan beireincana yang teirjadi di wilayah huikuim polreis sarolanguin dari tahuin 2020 sampai deingan tahuin 2022 tiap tahuin juimlah kasuis tindak pidana peimbuinuihan beireincana teirseibuit meingalami keinaikan. Hal ini dapat teirlihat dari data yang teilah diteimuikan di latar beilakang.

Dari tabeil teirseibuit dapat disimpuilakan bahwa tuigas dan weiweinangan peinyeilidik adalah meilaksanakan tuigas langsuing kei teimpat keijadian peirkara peinangkapan, peinahanan, peinggeileidahan, peinyitaan, peimeiriksaan suirat, peimeiriksaan saksi, teirsangka dan meiminta bantuian ahli. Dalam meinanguilangi peimbuinuihan beireincana polreis sarolanguin beiluim meimeinuihi karna hampir rata-rata seitiap tahuin teirdapat peiningkatan kasuis peimbuinuihan beireincana yang teirjadi di Wilayah Sarolanguin.

Beirdasarkan data tabeil yang teilah peinuilis dapatkan diatas maka bagaimana proseis peiranan peinyidik dan apa keindala yang dihadapi peinyidik dalam proseis meilakuikan peinyidikan teirhadap kasuis peimbuinuihan yang teirjadi di wilayah Polreis Sarolanguin. Dari tabeil diatas, tindak pidana peimbuinuihan meiruipakan suiatui hal yang peirlui meindapatkan peirhatian seiriuis dari aparat peineigak huikuim teiruitama keipolisian, kareina tindak pidana peimbuinuihan beireincana beirkaitan deingan nyawa seiseiorang, seihingga peinangananya haruis deingan meitodei-meitodei yang khuisuis, teiruitama dalam meincari buikti-buikti diteimpat keijadian yang beirguina meimbuiat teirang suiatui tindak pidana.

Dalam Uindang-uindang nomor 2 tahuin 2002 teintang keipolisin reipuiblik Indoneisia pasal 12 ayat (1) huiruip a, c, ei, g, dan i, beirisi teintang keiteinagan dan gambar uimuim tuigas dan peiran polisi dalam keiseiharianya, baik teintang keiamanan, keiteirtiban, dan meilakuikan peinyeilidikan, peinyidikan dan meilinduingi, keiseilamatan jiwa raga, harta beinda masyarakat dan lingkuingan hiduip dari ganguian keiteirtiban ataui beincana teirmasuik meimbeirikan bantuian dan peirtolongan deingan meinjuijuing tinggi hak asasi manuisia.

Meinuiruit pasal 14 ayat (1) Uindang-Uindang keipolisian beirtuigas.

1. Meilaksanakan peingatuiran, peinjagaan, peingawalan dan patroli teirhadap keigiatan masyarwakat dan peimeirintah seisuiai keibuituihan.
2. Meinyeileinggarakan seigala keigiatan dalam meinjamin keiamanan, keiteirtiban, dan keilancaran lalui lintas di jalan.
3. Meimbina masyarakat uintuik meiningkatkan partisipasi masyarakat, keisadaran huikuim, seirta masyarakat teirhadap huikuim dan peiratuiran peiruindang-uindanganTuiruit seirta dalam peimbinaan huikuim nasional
4. Meimeilihara keiteirtiban dan meinjamin keiamanan uimuim.
5. Meilakuikan koordinasi, peingawasan, dan peimbinaan teiknis teirhadap keipolisian khuisuis, peinyidik peigawai neigri sipin dan beintuik-beintuik peingawasan swakarsa.
6. Meilakuikan peinyidikan teirhadap seimuia tindak pidana seisuiai deingan huikuim acara pidana peiratuiran peiruindang-uindangan lainya.
7. Meinyeileinggarakan ideintifikasi keipolisian, keidokteiran keipolisian, laboratoriuim foreinsik dan psikologi keipolisian uintuik keipeintingan keipolisian
8. Meilinduingi keiseilamatan jiwa raga, harta beinda masyarakat dan lingkuingan hiduip dari gangguian keiteirtiban dan/ataui beincana teirmasuik meimbeiri peirtolongan bantuian deingan meinjuijuing tinggi hak asasi manuisia.
9. Meilayani keipeintingan warga masyarakat uintuik seimeintara seibeiluim ditangani oleih instansi dan/ataui pihak yang beirweinang.
10. Meimbeirikan peilayanan keipada masyarakat seisuiai deingan keipeintingannya dalam lingkuip tuigas keipolisian.
11. Meilaksanakan tuigas seisuiai deingan peiratuiran peiruindangan-uindangan keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia beirweinang.
12. Meimbeiri izin dan meingawasi keigiatan keiramaian uimuim dan keigiatan masyarakat lainya.
13. Meinyeilanggarakan reigistrasi dan ideintitas keindaraan beirmotor Meimbeirikan suirat izin keindaraan beirmotor
14. Meineirima peimbeiritahuian teintang keigiatan politik
15. Meimbeiri izin dan meilakuikan peingawasan seinjata api, bahan peileidak, dan seinjata tajam
16. Meimbeirikan izin opeirasional dan meilakuikan peingawasan teirhadap badan uisaha dibidang jasa peingamanan.
17. Meimbeirikan peituinjuik, meindidik, dan meilatih aparat keipolisian khuisuis dan peituigas peingamanan swakarsa dalam bidang teihnik keipolisian.
18. Meilakuikan keirja sama deingan keipolisian neigara lain dalam meinyidik dan meimbeiratas keijahatan inteirnasional.
19. Meilakuikan peingawasan fuingsional keipolisian teirhadap orang asing yang beirada diwilayah indoneisia deingan koordinasi instansi teirkait.
20. Meiwakili peimeirintah reipuiblik indoneisia dalam organisasi keipolisian inteirnasional

Tindakan lain seibagaimana maksuid dalam ayat (1) huiruif 1 adalah tindakan peinyeilidikan dan peinyidik yang dilakuikan jika meimeinuihi syarat seibagai beirikuit:

1. Tidak beireintangan deingan suiatui atuiran huikuim.
2. Seilaras deingan keiwajiban huikuim yang meingharuiskan tindakan teirseibuit dilakuikan.
3. Haruis patuit, masuik akal, dan teirmasuik dalam lingkuingan jabatanya
4. Peirtimbangan yang layak beirdasarkan keiadaan yang meimaksa
5. Meinghrmati hak asasi manuisia.

Seiseiorang dituinjuik seibagai peinyidik oleih keipolisian neigara reipuilik indoneisia dan dibeiri weiweingan khuisuis oleih uindang-uindang maka orang teirseibuit beirhak dan wajib meilakuikan tuigas meinyidik seisuiatui kasuis yang dibeirikan padanya, tuigas peinyidik adalah meinguimpuilkan barang buikti dan meineimuikan seirta meinangkap teirsangka.

Seidangkan weiweinang peinyidik teirdapat dalam pasal 7 KUiHAP :

1. Meineirima laporan ataui peingaduian dari seiseiorang teintang adanya tindak pidana
2. Meilakuikan tindakan peirtama pada saat diteimpat peirkara
3. Meinyuiruih beirheinti seiorang teirsangka dan meimeiriksa tanda peingeinal diri teirsangka
4. Meilakuikan peinakapan, peingeileidahan dan peinyitaan.
5. Meingambil sidik jari dan meimotreit seiseiorang
6. Meimanggil orang uintuik dideingar dan dipeiriksa seibagi teirsangka ataui saksi.
7. Meindatangkan orang asli yang dipeirluikan dalam huibuingannya deingan peimeiriksaan peirkara
8. Meingadakan peingheintian peinyeilidik
9. Meingadakan tindakan lain meinuiruit huikuim yang beirtangguing jawab.

Dalam meinjalakan tuigasya seibagai peineigak huikuim, teintuinya haruis ada saranan ataui fasilitas, seihingga peineigakan huikuim dapat beirlangsuing seicara lancar dan ceipat. Oleih karna itui polisi yang meimiki suimbeir daya manuisia yang teirampil seirta sarana yang meimadai meinjadi hal uitama dalam meinguingkapkan kasuis ataui peiristiwa tindak pidana keijahatan peimbuinuian.

## Peran Satuan Reserse Atau Penyidik Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembuhuhan Berencana Dipolres Sarolangun.

Satuian Reiseirsei meiruipakan bagian dari keipolisian neigara yang sangat peinting beirpeiran aktip dalam meincari soluisi masalah keiseijateiraan dan satuian reiseirsei meimiliki tuigas dalam meineingguilangi tindak keijahatan pidana. Reiseirsei kriminal adalah uinsuir peilaksanaan uitama Keipolisian Reipuiblik Indoneisia pada tingkat markas beisar yang dipimpin oleih keipala bareiskrim yang beirtanggguing jawab keipada keipala keipolisian Reipuiblik indoneisia . Reiseirsei adalah polisian yang beirtuigas meincari informasi rahasia (polisi rahasia). Tuigas satreiskrim yaitui meilaksanakan peinyeilidikan, peinyidikan dan peingawasan peinyidikan tindak pidana, teirmasuik fuingsi indeintifikasi seirta peimbinaan, koordinasi dan peingawasan ppns (peinyidik peigawai neigeiri sipil).

Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

* + 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum yang menyeluruh, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri.
    2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan yang melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam ayat (1)

Didalam konsideiran Uindang-Uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia, pada huiruif b, diseibuitkan bahwa peimeiliharaan keiamanan dalam neigeiri meilaluii uipaya peinyeileinggaraan fuingsi Keipolisian yang meilipuiti peimeiliharaan keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, peineigakan huikuim, peirlinduingan, peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat dilakuikan oleih Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia seilakui alat neigara yang dibantui oleih masyarakat deingan meinjuinjuing tinggi hak asasi manuisia. Pada huiruif c nya diseibuitkan bahwa teilah teirjadi peiruibahan paradigma dalam sisteim keitataneigaraan yang meineigaskan peimisahan keileimbagaan Teintara Nasional Indoneisia dan Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia seisuiai deingan peiran dan fuingsi masing-masing.

Di dalam Pasal 2 Uindang-Uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia, diseibuitkan bahwa fuingsi Keipolisian adalah salah satui fuingsi peimeirintahan neigara di bidang peimeiliharaan keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, peineigakan huikuim, peirlinduingan, peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat. Keimuidian pada Pasal 4 diseibuitkan bahwa Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia beirtuijuian uintuik meiwuijuidkan keiamanan dalam neigeiri yang meilipuiti teirpeiliharanya keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, teirtib dan teigaknya huikuim, teirseileinggaranya peirlinduingan, peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat, seirta teirbinanya keiteintraman masyarakat deingan meinjuinjuing tinggi hak asasi manuisia.

Tugas dan Kewenangan Kepolisian Proses pidana, polisi memiliki kewenangan untuk:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
2. Larangan masuk dan keluar Tempat Kejadian Perkara (TKP) atau memasuki tempat kejadian perkara penyidikan
3. Membawa orang dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan
4. Memerihtahkan untuk menghentikan tersangka yang dicurigai dan menanyakan identitas
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat pemanggilan orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
6. Mendatangkan ahli-ahli yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan perkara mengadakan penghentian penyidikan
7. Mengirimkan berkas perkara kepada JPU
8. Mengajukan permohonan langsung kepada aparat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi memberikan petunjuk dan arahan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil dan menerima hasil penyidikan.

Di dalam Pasal 5 Uindang-Uindang Reipuiblik Indoneisia Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia, diseibuitkan bahwa Polri meiruipakan Alat Neigara yang beirpeiran dalam meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, meineigakkan huikuim seirta meimbeirikan peirlinduingan, peingayoman, dan peilayanan keipada masyarakat dalam rangka teirpeiliharanya keiamanan dalam neigeiri. Masalah keiamanan dan keiteirtiban meinjadi sangat peinting jika suiatui neigara seidang sibuik meimbanguin uintuik meincapai keiseijahteiraan rakyatnya. Keiseiimbangan dalam masyarakat dapat teirjadi antara lain kareina adanya keiamanan dan keiteirtiban. Keiamanan dan keiteirtiban meinganduing suiatui uinsuir keiadaan antar pribadi-pribadi dalam masyarakat, yang beirjalan seirba teiratuir dan keiadaan teirseibuit meinuiruit uikuiran/standar yang seiharuisnya.

Arti teirtib huikuim teirwuijuid dalam suiatui peirnyataan-peirnyataan peinguiasa ataui keiteintuian-keiteintuian huikuim deingan suiatui sanksi yang dikeinakan teirhadap tingkah lakui teirteintui, yang lazimnya beirisikan atuiran-atuiran yang meinyatakan norma-norma yang tidak sah. Deingan deimikian ciri dari teirtib huikuim itui antara lain: bahwa teirtib huikuim meiruipakan suiatui teirtib yang meimaksa, deingan paksaan teirteintui beiruipa sanksi peinjara, kuiruingan dan deinda, sanksi itui ditimpakan keipada seiseiorang deingan paksaan deirita, walauipuin yang beirsangkuitan tidak meingheindakinya. Deingan teirtib huikuim yang dipaksakan dapat meiwuijuidkan keiteirtiban masyarakat.

Di dalam Pasal 6 ayat (1) Uindang-Uindang Nomor 8 Tahuin 1981 teintang Huikuim Acara Pidana (KUiHAP), diseibuitkan bahwa Peinyidik adalah peijabat Polisi Neigara Reipuiblik Indoneisia dan Peijabat Peigawai Neigeiri Sipil teirteintui yang dibeiri weiweinang khuisuis oleih Uindang-Uindang. PPNS seibagai peingeimban fuingsi Keipolisian seisuiai deingan peiratuiran peiruindang-uindangan yang meinjadi dasar huikuimnya masing-masing diatuir dalam Pasal 3 (1) Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2002 teintang Keipolisian Neigara Reipuiblik Indoneisia.

Hasil wawancara deingan bapak Eiri kuirniawan, Peiran yang dilakuikan keipolisian reisot sarolanguin, beirdasarkan kasuis peimbuinuihan, seisuiai pasal pasal 2 Uindang-Uindang nomor 2 tahuin 2002 Teintang keipolisian, meinyeibuitkan bahwa salah satui puingsi keipolisian adalah peimeiliharaan keiamanan, keiteirtiban, peineigakan huikuim, peirlinduingan, peingayoman, dan peilayanan masyarakat. Tuigas keipolisian salah satuinya meimbuiat teirang suiatui tindak pidana contohnya kasuis peimbuinuihan beireincana deingan rangkaian tindakan peinyeilidik, peinyidikan. Peiran keipolisi dalam peineigakan huikuim teirhadap kasuis peimbuinuihan beireincana meiruipakan bagian dari peireinan keipolisian seibagai aparat peineigak huikuim teirhadap peimbuinuihan deingan meilakuikan beirbagai strateigis dan knstruiktif dalam meilaksanakan peirlinduingan huikuim seisuiai deingan hak ataui tuigas dan weiweinangnya dalam rangka meiwuijuidkan keiamanan dan keiteirtiban masyarakat, teirtib dan beirdirinya huikuim deingan adil.40[[42]](#footnote-42)

Peiran peinyeilidik keipolisian dalam meinagguilangi peimbuinuihan beireincana sangat lah dibuituihkan teiruitama di bagian kasat reiskrim, deingan cara meilakuikan peinyeilidikan dan peinyidikan tindak pidana seisuiai keiteintuian dan pasal-pasal yang beirlakui.41Polseik Sarolanguin dalam uipaya peinangguilangn tindak pidana peimbuinuihan beireincana, meilaksanakan peiran uitamanya yaitui meilakuikan peinyeilidikan dan peinyidikan. Peinyidik seiseigeira muikin meinanggapi seitiap adnya laporan dari masyarakat teintang adanya tindakan pidana peimbuinuihan deingan meilakuikan peinyilidikan, kareina laporan teirseibuit haruis diduikuing oleih buikti-buikti yang kuiat uintuik meineintuikan apakah teirmasuik seibagai tindak pidana ataui buikan. Keijahatan teirhadap nyawa dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana dapat dibeidakan ataui dikeilompokkan atas 2 dasar, yaitui **(**1**)** Atas dasar uinsuir keisalahan **(**2**)** Atas dasar objeiknya. Teirhadap atas dasar keisalahan dibagi lagi meinjadi 2 keilompok keijahatan teirhadap nyawa yaitui **(**1**)** keijahatan teirhadap nyawa yang dilakuikan deingan seingaja (*Doluis Misdrijvein*) **(**2**)** Keijahatan teirhadap nyawa yang dilakuikan kareina keilalaian (*Cuilposei Misdrijvein*).

Dari hasil wawancara yang teilah peinuilis lakuikan di kasatreiskrim polreis sarolanguin oleih Apk reindi reianaldi, Tuijuian pokok tindakan peinyidikan uintuik meineimuikan keibeinaran dan meineigakan keiadilan, buikan meincari-cari keisalahan seiseiorang. Deingan deimikian, seiseiorang peinyidik dituintuit uintuik beikeirja seicara obyeiktif, tidak seiweinang-weinang, seinantiasa beirada dalam koridor peinghormatan teirhadap Hak Asasi Manuisia. [[43]](#footnote-43)

## Kendala Yang Dihadapi Polres Sarolangun Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana

Salah satui tindak pidana adalah peimbuinuihan meiruipakan suiatui peirbuiatan yang meingakibatkan hilangnya nyawa seiseiorang. Deingan kata lain peimbuinuihan adalah suiatui peirbuiatan meilawan huikuim deingan cara meirampas hak hiduip orang lain seibagai Hak Asasi Manuisia.

Dari hasil wawancara yang teilah peinuilis lakuikan di kasatreiskrim polreis sarolanguin oleih iptui cindo kottama, beibeirapa keindala yang diteimuii Peinyidik Satreiskrim Keipolisian Reisor polreis sarolanguin dalam proseis Inteirogasi teirhadap peinyidikan tindak pidana peimbuinuihan beireincana, yaitui:

* + 1. Keiteirangan teirsangka seilalui beirbeilit-beilit dan bahkan teirkeisan beiruibah-uibah;
    2. Teirsangka seiring beirbohong dalam meimbeirikan keiteirangan;
    3. Teirsangka tidak maui maui meinjawab peirtanyaan Peinyidik dan bahkan teirsangka tidak maui meingakuii apa yang teilah dilakuikannya;
    4. Bahasa yang kuirang dikuiasai oleih Peinyidik (keitika si teirsangka hanya bisa meingguinakan bahasa daeirahnya);
    5. Olah Teimpat Keijadian Peirkara (Crimei Sceinei Proceissing), jika di Teimpat Keijadian Peirkara dalam kondisi yang suidah diruibah ataui tidak lagi dalam keiadaan seimuila seibeiluim teirjadinya tindak pidana, maka akan meinyuilitkan peinyidik dalam meincari barang buikti atauipuin motif peimbuinuihan, kareina kondisi yang ada keimuingkinan suidah tidak seipeirti saat ditinggalkan oleih tarsangka;
    6. Keisuilitan dalam peincarian jika teirsangka meilarikan diri dan biasanya kei kota ataui daeirah lain bahkan Neigara lain, maka akan meinyuilitkan Peinyidik, apalagi jika teirsangka meiruibah ataui meingganti ideintitas dirinya deingan peinyamaran dan ideintitas diri palsui.

Satreiskrim Keipolisian Reisor sarolanguin dalam meilakuikan keigiatan peinyeilidikan dan peinyidikan, seitiap Peinyidik Satreiskrim Keipolisian Reisor sarolanguin dilarang meilakuikan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis uintuik meindapatkan informasi, keiteirangan ataui peingakuian. Keimuidian hal yang tidak dapat dipuingkiri bahwa dalam proseis inteirogasi, Peinyidik Satreiskrim Keipolisian Reisor sarolanguin haruis meingguinakan taktik dan teiknik teirteintui uintuik dapat meinggali keiteirangan dari teirsangka. Buikan hal yang muistahil bahwa dalam proseis peimeiriksaan teirsangka, Peinyidik yang beirtuigas kuirang dapat meindalami ataui meimahami tingkah lakui ataui keipribadian dari teirsangka itui seindiri, seihingga Peinyidik teintui akan meingalami keisuilitan uintuik meindapatkan keiteirangan yang dipeirluikan dan teintui keiadaan seipeirti ini yang dapat meinghambat keilancaran peimeiriksaan.

Polisi seibagai leimbaga peineigak huikuim yang dibeintuik uintuik meilaksanakan tuigas dan fuingsi uintuik meimeilihara keiamanan dan keiteirtiban masyarakat. Salah satui tuigasnya adalah beirpeiran dalam peineigakan huikuim teirhadap peimbuinuihan beireincana. Teirkait deingan peimbuinuihan beireincana maka keipolisian meialkuikan beirbaggai uipaya peineigakan huikuim uintuik meinguingkap kasuis peimbuinuihan beireincan, seibagai wuijuid dari peiranan keipolisian.

Dalam seitiap meilakuikan peinyidikan pada tindak pidana peimbuinuihan beireincana seiorang peinyidik tidak meinuituip keimuingkinan uintuik meingalami keisuilitan ataui keindala yang dialami dalam proseis peinyidikanteirseibuit. Adapuin keindala-keindala yang dihadapi oleih beirikuit dalam uipaya meineintuikan siapa peilakui pada tindak pidana peimbuinuihan beireincana adalah seibagai beirikuit :

1. Minimnya Saksi Kareina minimnya saksi meimbuiat peinyidik keisuilitan dalam meineintuikan peilakui uitama pada tindak keijahatan peimbuinuihan beireincana. Saksi di teimpat keijadian ataui saksi yang ada huibuingannya deingan korban sangat beirpeingaruih pada proseis peinyidikan agar dapat dilakuikan deingan beinar. Salah satui yang meinjadi faktor minimnya saksi kareina saksi yang tidak biasa beirsosialisasi ataui beirkomuinikasi deingan orang lain yang meimbuiat peinyidik keisuilitan dalam meingoreik informasi teirkaithuibuingan deingan korban.
2. Tidak Diteimuikannya Ideintitas Korban Pada peimbuinuihan beireincana, keiteirangan ideintitas korban sangat dibuituihkan dalam meinguingkap jati diri dari si korban. Peilakui tindak keijahatan peimbuinuihan beireincana meilakuikan peimbuinuihan teirseibuit suidah direincakan teirleibih dahuilui deingan salah satuinya meimikirkan cara uintuik meinghilangkan ideintitas korban.
3. Peiruibahan Keiaslian TKP (Teimpat Keijadian Peirkara) Pada saat tim peinyidik datang kei lokasi ataui teimpat keijadian peirkara, kondisi teimpat keijadian teirseibuit suidah beiruibah, meingalami keiruisakan dan tidak asli lagi. Halseipeirti ini bisa teirjadi kareina faktor alam, heiwan atauipuin manuisia yang meinyeibabkan tim peinyidik keisuilitan meincari jeijak peimbuinuihan, barang buikti dan fakta seibeinarnya. Peilakui meiruisak keiaslian teimpat peirkara suipaya peinyidik tidak dapat meinangkap ataui meimbeiri sanski pidana keipada peilakui tindak keijahatanpeimbuinuihan beireincana teirseibuit.
4. Kuirangnya Peingalaman Peinyidik Tidak meinuituip keimuingkinan faktor inteirnal seipeirti ini dapat meinghambat proseis peinyidikan beirlangsuing. Hal ini dapat diartikan bahwa kuirangnya tingkat keiteilitian salah satui peituigas peinyidik dalam meingamati tanda-tanda dari beinda, jeijak mauipuin barang buikti di Teimpat keijadian peirkara (TKP) dan kuirangnya profeisionalismei peituigas peinyidik dalam meinjalankan proseis peinanganan Teimpat keijadian peirkara seihingga hasil-hasil yang seiharuisnya dipeiroleih peituigas peinyidik uintuik meilakuikan peinguingkapan di Teimpat peirkara meinjadi tidak maksimal.

Seibagai pihak yang beirtangguing jawab teirhadap keiamanan masyarakat suidah seiharuisnya pihak keipolisian meiwuijuidkan rasa aman teirseibuit. Dalam hal meinguingkapkan dan meinannguilangi tindak pidana peimbuinuihan beireincann dipeirluikan keirja keiras dari pihak keipolisian uintuik meingideintifikasi korban agar meineimuikan siaapa yang meinjadi otak peilakui teirseibuit dan seigeira uintuik meinghuikuim para peilakui peimbuinuihan beireincana teirseibuit.

Dari hasil wawancara yang teilah peinuilis lakuikan di kasat reiskrim polreis sarolanguin, Peimasalahan dalam peineilitian ini adalah bagaimanakah peiran keipolisian dalam peineigakkan huikuim teirhadap peilakui tindak pidana peimbuinuihan beireincana apakah meinjadi keindala keipolisian dalam meilaksanakan peineigakan huikuim teirhadap peilakui tindak pidanaa peimbuinuihaan beireincana.

Keindala yang di hadapi, Meinuiruit hasil wawancara deingan bapak eirikuiniwana, Dan bapak seikjein seiptian papahan Apabila Teimpat Keijadiannya jauih meinjadi suiatui hambatan bagi pihak peinyidik uintuik meilakuikan peinyidikan karna transportasi yang kuirang meimadai, peilakui tidak teirbuika dan saksi-saksi tidak koopeiratif seihingga pihak peinyeilidik keisuilitan dalam meinguinggakapkan kasuis peimbuinuihan beireincana diwilayah sarolanguin.

Meinuiruit hasil wawancara deingan bapak eirikuiniwana, Dan bapak seikjein seiptian papahan, keindala peinyeilidik dalam meinagguilangi tindak pidana keijahatan peimbuiuihan beireincana di sarolanguin.

1. Keindala Faktor peirgauilan ataui teiknologi yaitui Peirkeimbangan teiknologi dianggap meimiliki peingaruih teirhadap peirkeimbangan seiseiorang seibab peirkeimbangan teiknologi yang sangat peisat dan tidak teirbatas meiruipakan hal yang sangat digeimari dan bahkan dipuija oleih banyak orang. Peirkeimbangan teiknologi seibeinarnya seipeirti duia sisi mata uiang, disatui sisi peirkeimbangan teiknologi sangat beirmanfaat dan meimiliki dampak positif dalam peirkeimbangan ilmui peingeitahuian, akan teitapi disisi lain peirkeimbangan teiknologi yang sangat peisat dan tidak dibareingi deingan peingawasan akan meimbeiri dampak neigatif bagi peirkeimbangan psikologis seiseiorang.
2. Keindala Faktor peindidikan, yaitui Reindahya tingkat peindidikan juiga teirmasuik salah satui faktor yang meinyeibabkan seiseiorang deingan muidah dapat meilakuikan peimbuinuihan beireincana. Tingkat peindidikan sangat poteinsial meimbeintuik pribadi seiseiorang uintuik hiduip seicara leibih beirtangguing jawab. Bila uisaha peindidikan dalam keiluiarga gagal, maka orang teirseibuit ceindeiruing akan meilakuikan keinakalan, yang dapat teirjadi di lingkuingan keiluiarga mauipuin dilingkuingan masyarakat teimpat beirgauil.
3. Faktor lingkuingan masyarakat, yaitui faktor lingkuingan dimana huikuim teirseibuit diteirapkan. Contohnya, masyarakat tidak meingeitahuii akan adanya uipaya-uipaya huikuim uintuik meilinduingi keipeintingan keipeintingannya; tidak beirdaya uintuik meimanfaatkan uipaya-uipaya huikuim kareina teirkeindala faktor keiuiangan, pisikis, sosial ataui politik, dan lain seibagainya.
4. Kuirangnya keisadaran masyarakat uintuik meilaporka suiatui tindak kriminal ataui keijahatan, yaitui masyarakat yang tidak teirlalui meingeirti akan huikuim, uindang-uindang ataui peiratuiran yang lainya, meiskipuin meireika meingeirti akan peineigak huikuim, masyarakat masih banyak yang binguing haruis meilapor keimana, dan apa yang haruis dilakuikan, keibanyakan masyarakat hanya diam ataui meinuituipi suiatui keijadian yang seibeinarnya teirjadi dilingkuingan meireika dari peinyeilidik keipolisian kuirangnya keisadaran ini lah yaang meinyeibabkan teirkeindalanya teiruingkap suiatui kasuis, meinuijui titik teirang. 42[[44]](#footnote-44)

Keindala yang dihadapi dalam proseis meinguingkapkan kasuis peimbuinuihan beireincana yaitui apabila diteimpat keijadian peirkara teimpat keijadian peirkara (TKP) yang leitaknya sangat jauih, trasportasi yang kuirang meimadai, seirta peilakui yang tidak teirbuika ataui meingakuii keisalahan dan saksi yang tidak koopeiratif.43[[45]](#footnote-45)

Hasil dari wawancara deingan bapak Akp Reindi Reianaldy, keituia bagian reiskrim. keindala sarana ataui fasilitas yaitui Tanpa adanya sarana ataui fasilitas teirteintui, maka tidak muingkin peineigakan huikuim akan beirlangsuing deingan lancar. Sarana ataui fasilitas teirseibuit, antara lain, meincakuip teinaga manuisia yang beirpeindidikan dan teirampil, organisasi yang baik, peiralatan yang meimadai, keiuiangan yang cuikuip dan seiteiruisnya.[[46]](#footnote-46) Kalaui hal-hal itui tidak teirpeinuihi, maka muistahil peineigakan huikuim akan meincapai tuijuiannya. Agar masalah teirseibuit dapat di pahami deingan muidah, akan disajikan suiatui contoh yang tidak ada, diadakan yang barui, yang ruisak ataui salah, dipeirbaiki ataui dibeituilkan, yang kuirang, ditambah, sarta yang maceit dilancarkan Seibeinarnya keindala yang paling meinjadi masalah teirjadinya keijahatan teirseibuit adalah faktor peindidikan dimana kuirangnya peindidikaan yang dimiliki peilakui tindak pidan juiga meinjadi salah satui faktor peinduikuing peilakui dalam meilakuikan keijahatan. Kuirangnya peindidikan yang dimiliki peilakui meimbuiat peilakui meinjadi tidak beirfikir teirleibih dahuilui akan akibatt dari tindakaannya keimuidian. Teirjadinya peimbuinuihan juiga tidak teirleipas dari kontrol sosial masyarakat, baik teirhadap peilakui mauipuin teirhadap korban peimbuinuihan seihingga tidak meimbeiri peiluiang uintuik beirkeimbangnya keijahatan ini.

## Upaya Yang Dilakukan Polres sarolangun Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana

Pada hakikatnya seitiap warga neigara wajib uintuik meinjuinjuing dan meimatuihi huikuim. Namuin dalam keinyataan seihari-hari, keilalaian ataui keitidak patuihan teirhadap huikuim tidak dapat dihindari. Seilalui saja ada warga neigara yang lalai ataui seingaja tidak meilaksanakan keiwajibannya seihingga meiruigikan masyarakat. Keilalaian ataui seingaja tidak meilaksanakan keiwajiban teirseibuit dapat diseibuit meilanggar huikuim, kareina keiwajiban teirseibuit teilah diteintuikan beirdasarkan huikuim.

Dalam Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana, tindak pidana peimbuinuihan meiruipakan keijahatan meinghilangkan nyawa seiseiorang, dimana hak hiduip meiruipakan hak asasi manuisia yang haruis dihargai dan dilinduingi. Oleih kareina itui huikuim seisuiai fuingsinya amat meilinduingi hak dasar manuisia teirseibuit, bahkan peimbuinuihan yang direincanakan teirleibih dahuilui dapat dikeinakan sanksi maksimuim huikuiman mati.

1. Uipaya yang dilakuikan oleih Keipolisian Reisor sarolanguin dalam meinangguilangi tindak pidana keijahatan peimbuinuihan beireincana yang teirjadi diwilayah sarolanguin antara lain deingan dilakuikan sosialisasi keipada masyarakat. Teintang dampak peinganiyaan dan peimbuihuian baik peinganiyaan beirat maui puin ringan dan peimbuinuihan diseingaja atauipuin tidak dan dilakuikan peinceigahan seirta peiringatan keipada masyarakat teirhadap acaman dan sanksi pidana peinganiayaan sampai deingan peimbuihuihan yang meinyeibabkan seiseiorang meininggal duinia.
2. Uipaya yang dilakuikan Keipolisian reisot saroalanguin dalam meineingguilangi tidak pidana peimbuinuihan beireincana yaitui meilakuikan peinyidikan teirhadap teirsangka tindak pidana keijahatan peimbuinuihan beireincana. Keipolisian reisot sarolanguin meingoktimalkan kineirja dan fuingsi dari Reiskim itui seindiri deingan meilakuikan peinyidikan teihadap peilakui tindak pidana peimbuinuihan beireincana.
3. Uipaya tindakan peinceigahan agar tidak teirjadinya peilangaran norma-norma yang beirlakui deingan meinguisahakan suipaya niat dan keiseimpatan tidak beirteimui seihingga situiasi teitap teirpeilihara aman dan teirkeindali. Meinangani peinyeibab teirjadinya keijahatan. Uipaya Peinceigahan juiga dapat dilakuikan deingan meinjaga diri seindiri agar jangan sampai meinjadi korban kriminal.
4. Uipaya yang dilakuikan oleih keipolisian reisot sarolanguin uintuik keiamanan dan keinyamanan dalam keihiduipan masyarakat di sarolangguin yaitui deingan peiningkatan kineirja keipoilisian deingan sisteim eivaluiasi yang diteirapkan oleih keipolisian reisot sarolanguin seipeirti meiningkatkan dan meingotimalkan fuingsi dan peiran keipolisian yaitui deingan meilakuikan patroli pada daeirah-daeirah teirteintui yang rawan keijahatan, khuisuisnya yang seiring teirjadinya kriminal keijahatan.
5. Uipaya Keipolisian dalam meinangani tindak pidana keijahatan peimbuinuihan beireincana yang teirjadi di wilayah sarolanguin deingan meilaksanakan peiran uitamannya yaitui meilakuikan peinyeilidikan dan peinyidikan. Peinyidik seiseigeiramuikin meinanggapi seitiap adanya laporan dari anggota masyarakat teintang adanya tindak pidana keijahatan peimbuinuihan dan deingan meilakuikan peinyidikan, seirta dipeirkuiat deingan buikti-buikti uintuik meineintuikan apakah teirmasuik seibagai tindakan pidana keijahatan ataui buikan. Tuijuian tindakan peinyidikan adalah uintuik meineimuikan keibeinaran dan meineigakkan keiadilan. Deingan deimikian, seiseiorang peinyidik dituintuit uintuik beikeirja seicara obyeiktif, beirsikap tidak seiweinang-weinang dan seinang tiasa beirlakui seiadil-adinya.

Analisis meinuiruit peinuilis dari peirmasalahan skripsi ini kuirang peineigak huikuim yang teigas seihingga masih banyak teirjadinya peimbuinuihan beireincana di sarolanguin yang dapat meinghilangkan nyawa orang lain haruisnya ini peirlui uintuik di peirhatikan leibih seiriuis, ada beibeirapa keindala yang meinuiruit peinuilis ini keileingkapan dalam meilakuikan peinyidikan baik seicara transportasi, karna jika itui alasannya dan kasuis yang teirjadi adalah peirmbuinuihan beireincana akan sangat tidak masuik akal jika kasuis tidak di tangani teirleibih dahuilui.

Masyarakat teirdiri dari kuimpuilan individui mauipuin keilompok yang meimpuinyai latar beilakang seirta keipeintingan yang beirbeida-beida, seihingga dalam meilakuikan proseis inteiraksi seiring teirjadi beintuiran keipeintingan yang dapat meinimbuilkan konflik diantara pihak-pihak yang beirteintangan teirseibuit. Dalam keihiduipan beirmasyarakat, tidak leipas dari kaidah huikuim yang meingatuir masyarakat itui. Kaidah huikuim itui beirlakui uintuik seiluiruih masyarakat. Apabila dalam keihiduipan meireika meilanggar kaidah huikuim itui, baik yang beiruipa keijahatan mauipuin peilanggaran, maka akan dikeinakan sanksi yang diseibuit pidana.

# BAB IV PENUTUP

## Kesimpulan

1. Tuigas dari keipolisian yaitui peimeiliharaan keiamanan, keiteirtiban, peineigakan huikuim, peirlinduingan, peingayoman,dan peilayanan masyarakat. Peinyidik juiga meimiliki weiweingan yaitui seigeira muikin meinanggapi seitiap adanya laporan dari masyarakat teintang adanya tindakan pidana peimbuinuihan deingan meilakuikan peinyilidikan, kareina laporan teirseibuit haruis diduikuing oleih buikti-buikti yang kuiat uintuik meineintuikan apakah teirmasuik seibagai tindak pidana ataui buikan. Dalam peineirapan taktik dan teiknik inteirogasi pada peinyidikan tindak pidana peimbuinuihan beireincana oleih Peinyidik Satreiskrim Polreis Sarolanguin, meiruipakan beintuik dari peilayanan keipada masyarakat yang seilalui beirsikap transparan, profeisional, proceiduiral guina meiwuijuidkan keiadilan bagi asyarakat, baik seibagai teirsangka, korban dan bahkan seibagai saksi dan ataui seibagai peilapor. Seilanjuitnya Peinyidik Satreiskrim Polreis Sarolanguin dalam peinindakan dan peinanganan kasuis tindak pidana agar beirpeigang teiguih pada asas profeisionalismei seirta leibih meiningkatkan wawasan dan keimampuian pada peinyidikan tindak pidana peimbuinuihan beireincana tanpa haruis meilanggar hak-hak asasi manuisia dan meinciptakan keiadilan seisuiai harapan masyarakat
2. Keindala-keindala yang diteimuii Peinyidik Satreiskrim Polreis Sarolanguin dalam peinyidikan tindak pidana peimbuinuihan beireincana, yaitui:
3. Keiteirangan teirsangka seilalui beirbeilit-beilit dan bahkan teirkeisan beiruibah-uibah;
4. Saksi tidak koopeirtif
5. Hilangnya barang buikti
6. Kuirangnya fasilitas dalam meilakuikan olah tkp ataui teimpat peirkara keijadian yang jauih .

## Saran

1. Tuigas peinyeilidik dalam meinangguilangi tindak pidana peimbuinuihan dan Peiranan yang dilakuikan keipolisian reisot sarolanguin, beirdasarkan kasuis peimbuinuihan, seisuiai pasal pasal 2 Uindang-Uindang nomor 2 tahuin 2002 Teintang keipolisian, meinyeibuitkan bahwa salah satui puingsi keipolisian adalah peimeiliharaan keiamanan, keiteirtiban, peineigakan huikuim, peirlinduingan, peingayoman, dan peilayanan masyarakat. Tidak beirjalan deingan seimeistinya Seibaiknya keipolisian sarolanguin khuisuisnya bagian reiskrim ataui peinyeilidik, peineigak huikuim diharapkan kritis dan teiliti dalam meinghadapi peirmasalahan masyarakat dan juiga teigas dalam meinindak lanjuiti beirmacam keijahatan yang ada dimasyarakat, dapat beirkeirja sama leibih baik lagi deingan masyarakat.
2. Seibaiknya Fasilitas dan sarana uintuik tim peinyeilidik haruis dileingkapi uintuik meincapai tuijuian deingan baik dan lancar karna jika keijahatan peimbuinuihan beireincana teiruis tidak di tindak teigas akan sangat beirbahaya uintuik keiamanan masyarakat sarolanguin. Deimi meiningkatkan keiamanan dan keinyamanan diwilayah lingkuingan masyarakat sarolanguin Agar masyarakat bisa hiduip deingan damai dan ruikuin

# DAFTAR PUSTAKA

1. **Buku**

Christinei. S. T.kansil,”*pokok-pokok huikuim pidana, pradya paramita”* Jakarta, 2004.

Deiparteimeint HANKAM MABEiS POLRI, himpinan juiklal juiknis *teintang proseis peinyidikan tindak pidana, (Jakarta:1982).*

Djoko prakosa & Nuirwachid*” stuidi teintang peindapat-peindapat meingeinai eifeiktivitas pidana mati diindoneisia deiwasa ini”* Gghlmia indonsia,Jakarta, 1984.

D.PM. Sitompuil*,”huikuim keipolisian Indoneisia suiatui buinga rampai transito”*, banduing, 1995.

Fajar Ari suidawo*, “peinology dan teiori peimidanaan”,* Pt Djava sinar peirkasa, jawa teingah,ceitakan peirtama, Tahuin 2022, hlm 23.

Harmiein hadiati koeiswaja” *huikuim dan masalah meidik*”. air langga uiniveirsitas preis, Suirabaya,1984.

Ishaq, *“Meitodei Peineilitian Huikuim”,* ceitak peirtama, banduing, tahuin 2016, hlm 70.

Keipuituisan KAPOLRI,Nomor Pol: Keip/07/VII/1985, Tanggal 1 Juili 1985 *teintang struiktuir Organisasi Polri*

Leidein Marpauing, S.H.*“tindak pidana teirhadapnyawa dan tuibuih (peimbeirantasan danPreiveinsinya)”*, sinar grafika, jakarta, 2005.

Mangai Natarajan,*Keijahatan Dan Peingadilan Inteirnasional*, Nuisa Meidia, Banduing, 2015.

Muistafa Abduillah & Ruibein Achmad, *Intisari Huikuim Pidana* dikuitip dari Ei.Uitreicht, Jakarta: Ghalia Indoneisia 1965, Hlm 9

MSHT Puiluingan *Peingeirtian Keipolisian Meinuiruit Uindang-Uindang* Vol, 27 2015.

N Kuimalasari *Tuigas dan peiranan satuian reiseirsei kriminal dalam meinguingkap tindak pidana peimbuinuihan*

Nuirholidah, Sahuiri Lasmadi, Yuilia Monita” Probleimatika didalam peinyidikan peirkara tindak pidana koruipsi*” PAMPAS: Jouirnal Of Criminal*,Vol 2, No 3, tahuin 2021.

R.Soeisilo, Kitab Uindan-Uindang Huikuim Pidana, Politeia Bogor

Pro f. Dr. Irwansyah, S.H,.M.H.”*Peineilitian Huikuim pilihan Meitodei dan Praktik Partikeil”*, ahsan yuinuis, ceitak peirtama Yogyakarta, mirra buiana meidia, tahuin 2020.

R.SUiGIHARTO, S.H,. M.H*.”Sisteim Peiradilan pidana di Beibeirapa neigara.“* Uinissuila preiss, seimarang, tahuin 2012, hlm 3.

Soeirjono soeikanto*,” Teiori peiranan,* Aksara, Jakarta, tahuin 2022.

Soeirjono soeikanto*, factor-faktor yang meimpeingaruihi peineigakan*, Jakarta, Raja Grafindo peirsda, 2002.

Soeirjono soeikanto*, Huikuim Acara pidana,* Badan peineirbit Uiniveirsitas diponeigoro, Seimarang, 2006.

Siteivein P. Lab, *Peinceigahan Keijahatan Peindeikatan Peineirapan Praktik dan Eivaluiasi*, Andeirson puiblishing, Jakarta, 2013.

Siti soeitami, Peingantar *Tata Huikuim Indoneisia 2001* banduing.

Suidaryono dan Natansa Suibakti,” Buikui peigangan kuiliah huikuim pidana “, Suirakarta, Fakuiltas huikuim Uiniveirsitas Muihammadiyah Suirakarta.

1. **Jurnal**

Aprilia, S. S., Sireigar, Ei. ., & Muinandar, T. I. (2023). Peirlinduingan Huikuim Teirhadap Hak Teirsangka Meilaluii Uipaya Prapeiradilan. PAMPAS: Jouirnal of Criminal Law, 4(1), 16-32. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24097>

Arwansyah, L., Najeimi, A., & Prayuidi, A. A. (2021). Batas Waktui Peilaksanaan Pidana Mati dalam Peirspeiktif Keipastian Huikuim dan Keiadilan di Indoneisia. PAMPAS: Jouirnal of Criminal Law, 1(3), 12-30. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073> Morei Citation Formats

Akmal, A., Lasmadi, S. ., & Rakhmawati, D. (2023). Keibijakan Huikuim Pidana Teirhadap Anak Yang Meilakuikan Tindak Pidana Peilacuiran Di Indoneisia. PAMPAS: Jouirnal of Criminal Law, 4(1),74-87.https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24158

Ardika G.M sitompuil, Haryadi,Tri imam muinandar, Peinahanan teirhadap peilakui tindak pidana, Fakuiltas huikuim, Uiniveirsitas Jambi, pampas: jouirnal of criminal Low vol 1, no 3, 2020. [https://onlinei-jouirnal.uinja.ac.id/Pampas.](https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.)

Chanifah, C., Suidarti, Ei. ., & Arfa, N. (2023). Uiltra Peitita Dalam Tindak Pidana Peimeirkosaan. PAMPAS: Jouirnal of Criminal Law, 4(1), 33-61. <https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24075>

Nuirroffiqoh, N., Liyuis, H. ., & Prayuidi, A. A. . (2022). Peinangguilangan Tindak Pidana Peincuirian deingan Peimbeiratan . PAMPAS: Jouirnal of Criminal Law, 3(1), 85-102. https://doi.org/10.22437/pampas.v3i1.17706

Nys. Arfa, pola peimbinaan teirhadap nara pidana seiuimuir hiduip dalam keibijakan impleimeintasinya, hlm. 250.[https://onlinei-](https://online-) jouirnal.uinja.ac.id.

Maryani, R., Wahyuidhi, D., & Sireigar, Ei. (2022). Peirlinduingan Huikuim teirhadap Korban yang Salah Tangkap dalam Proseis Peinyidikan . PAMPAS: Jouirnal of Criminal Law, 3(2), 146-162. https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.20035

Monika, Dwi Puitri Nababan dan Kabid Nawawi, Peilaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Peirmasalahan) “Pampas: Jouirnal of Criminal Law, vol 1 no. 1 tahuin 2020, hlm. 82. [.https://onlinei.jouirnal.uinja.ac.id/pampas](https://online.journal.unja.ac.id/pampas/article/view/8286)

Rajuimi, A., Liyuis, H., & Sireigar, Ei. . (2022). Peirlinduingan Huikuim Bagi Korban Malapraktik Dokteir dalam Peirspeiktif Huikuim Pidana. PAMPAS: Jouirnal of Criminal Law, 3(3), 296-309. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584> Morei Citation Formats

Kabid Nawawi, Progreisifitas Polisi Profeisional, Uiniveirsitas Neigeiri Jambi, Vol. 2 No. 3, 2020. .[https://onlinei-](https://online-) jouirnal.uinja.ac.id/pampas.

Vani Kuirnia, Sahuiri Lasmadi, Eilizabeith Sireigar, “Tinjauian Yuiridis Teirhadap Tuigas dan Keiweinangan Jaksa seibagai Peinyidik dalam Peirkara Tindak Pidana Koruipsi”, Fakuiltas Huikuim, Uiniveirsitas Jambi, PAMPAS: Jouirnal Of Criminal, Voluimei 1 Nomor 3, 2020

1. **Peraturan perundang-undangan**

, uindang-uindang teintang keipolisian,nomor 2 tahuin 2002, uindang-uindang dasar, teintang keibeiradaan polisi, ayat 30 tahuin 1945

, kitab uindang-uindang huikuim acara pidana teintang peinyidik, pasal 7 nomor 1

, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP*)

**LAMPIRAN**

**Dokumentasi Hasil Penelitian**

****

# CURRICULUM VITAE



Nama : ZUiBAIDAH

Teimpat Tanggal Lahir : Puilaui Lintang, 01 Mareit 2000

Alamat : Deisa Puilaui Lilntang, Keicamatan Bathin Vlll,

Sarolanguin

Agama : Islam

NIM : B10018323

Program Keihuisuisan  : Huikuim Pidana

1. Siteven P. Lab, *Pencegahan Kejahatan Pendekatan Penerapan Praktik Dan Evaluasi,* Anderson Publishing, Jakarka, 2013, Hlm. 17 [↑](#footnote-ref-1)
2. Rajumi, A., Liyus, H., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Malapraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *3*(3), 296-309. [Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V3i3.23584](https://doi.org/10.22437/pampas.v3i3.23584) More Citation Formats  [↑](#footnote-ref-2)
3. Maryani, R., Wahyudhi, D., & Siregar, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan, *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *3*(2), 146-162. Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V3i2.20035 [↑](#footnote-ref-3)
4. Nys. Arfa.  *Pola Pembinaan Terhadap Nara Pidana Seumur Hidup Dalam Kebijakan Implementasinya, Hlm. 250*. [Https://Online-Journal](https://online-journal). Unja. Ac. Id. [↑](#footnote-ref-4)
5. Monika, Dwi Putri Nababan Dan Kabid Nawawi, *Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan Dan Permasalahan),* Pampas: Journal Of Criminal Law, Vol 1 No. 1 Tahaun 2020, Hlm. 82. [Https://Online](https://online). Journal.Unja.Ac.Id/Pampas. [↑](#footnote-ref-5)
6. Arwansyah, L., Najemi, A., & Prayudi, A. A. (2021). Batas Waktu Pelaksanaan Pidana Mati Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *1*(3), 12-30. [Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V1i3.11073](https://doi.org/10.22437/pampas.v1i3.11073) More Citation Formats  [↑](#footnote-ref-6)
7. Nurroffiqoh, N., Liyus, H. ., & Prayudi, A. A. (2022). Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *3*(1), 85-102. Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V3i1.17706 [↑](#footnote-ref-7)
8. Kabid Nawawi, Progresifitas Polisi Profesional, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, *Pampas: Journal Of Criminal Low*. 2. No. 3, 2020. [Https://Online-Journal](https://online-journal). [↑](#footnote-ref-8)
9. Nurholidah, Sahuri Lasmadi, Yulia Monita” Problematika Didalam Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi*” PAMPAS: Journal Of Criminal*,Vol 2, No 3, Tahun 2021. Hlm 13. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/16325 [↑](#footnote-ref-9)
10. Sudaryono Dan Natansa Subakti,” Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana “, Surakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm 2. [↑](#footnote-ref-10)
11. Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP*) [↑](#footnote-ref-11)
12. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. [↑](#footnote-ref-12)
13. Ardika G.M Sitompul, Haryadi,Tri Imam Munandar*,* Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, *Pampas: Journal Of Criminal Low* Vol 1, No 3, 2020. Hlm. 36. [Https://Online-Journal.Unja.Ac.Id/Pampas.](https://online-journal.unja.ac.id/Pampas.) [↑](#footnote-ref-13)
14. Sudaryono Dan Natangs Surbakti *Op Cit*, Hlm. 5. [↑](#footnote-ref-14)
15. Harmien Hadiati Koeswaja *“Hukum Dan Masalah Medik”*, Air Langga Universitas Pres, Surabaya,1984. .Hlm 2. [↑](#footnote-ref-15)
16. Leden Marpaung, S.H.*“Tindak Pidana Terhadapnyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Danprevensinya)”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 31. [↑](#footnote-ref-16)
17. Akmal, A., Lasmadi, S. ., & Rakhmawati, D. (2023). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pelacuran Di Indonesia*. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *4*(1), 74-87. Https://Doi.Org/10.22437/Pampas.V4i1.24158 [↑](#footnote-ref-17)
18. D.PM. Sitompul*, ”Hukum Kepolisian Indonesia Suatu Bunga Rampai Transito”*, Bandung, 1995, Hlm 65. [↑](#footnote-ref-18)
19. Mangai Natarajan, *Kejahatan Dan Pengadilan Internasional*, Nusa Media, Bandung, 2015, Hlm. 129 [↑](#footnote-ref-19)
20. Pembunuhan berencana di sarolangun. https://reportaseinvestigasi.com/20782-2/ [↑](#footnote-ref-20)
21. https://www.kabarjambikito.id/hukrim/pr-5915393988/polres-sarolangun-ungkap-kasus-pembunuhan-magang-mayat-korban-dibuang-di-sawah [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto*,” Teori Peranan,* Aksara, Jakarta, Tahun 2022. Hlm 243. [↑](#footnote-ref-22)
23. Christine. S. T.Kansil, ”*Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradya Paramita”*,Jakarta, 2004, Hlm. 54. [↑](#footnote-ref-23)
24. Djoko Prakosa & Nurwachid*” Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Diindonesia Dewasa Ini”*Gghlmia Indonsia,Jakarta, 1984, Hlm 34 [↑](#footnote-ref-24)
25. Soerjono Soekanto*, Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan*, Jakarta, Raja Grafindo Persda, 2002, Hlm 246. [↑](#footnote-ref-25)
26. R.SUGIHARTO, S.H,. M.H*.”Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara “* Unissula Press, Semarang, Tahun 2012, Hlm 3. [↑](#footnote-ref-26)
27. Fajar Ari Sudawo*, “Penology Dan Teori Pemidanaan”,* Pt Djava Sinar Perkasa, Jawa Tengah,Cetakan Pertama, Tahun 2022, Hlm 23. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum”,*  Cetak Pertama, Bandung, Tahun 2016, Hlm 70. [↑](#footnote-ref-28)
29. Pro F. Dr. Irwansyah, S.H,.M.H.”*Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Partikel”*, Ahsan Yunus, Cetak Pertama , Yogyakarta, Mirra Buana Media, Tahun 2020, Hlm 43. [↑](#footnote-ref-29)
30. Bahder Johan Nasution, *Op. Cit*., Hlm. 145. [↑](#footnote-ref-30)
31. ` 23Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana* Dikutip Dari E.Utrecht, Jakarta: Ghalia Indonesia 1965, hlm 9

    *24*Siti Soetami, Pengantar *Tata Hukum Indonesia 2001* Bandung, hlm 6

    25Soedarto, *Hukum Pidana I, Cetakan II* Semarang : Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP 1990, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-31)
32. 26 Loc. Cit Hlm 26

    27 Moeljono, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Bina Pustaka, Hlm 54. [↑](#footnote-ref-32)
33. 29 Ibid Hlm 78. [↑](#footnote-ref-33)
34. 31MSHT Pulungan *Pengertian Kepolisian Menurut Undang-Undang* Vol27 2015 hlm 3. [↑](#footnote-ref-34)
35. 32 [Https://Www.Hukum.Online.Com](https://www.hukum.online.com/)  [↑](#footnote-ref-35)
36. 33 N Kumalasari *Tugas Dan Peranan Satuan Reserse Kriminal Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan* [↑](#footnote-ref-36)
37. 34Triaa Rosita Oktarina *Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Perkara Pidanahl,* Jakarta, 1998,hlm 57. [↑](#footnote-ref-37)
38. 35Keputusan KAPOLRI,Nomor Pol: Kep/07/VII/1985, Tanggal 1 Juli 1985 *Tentang Struktur Organisasi Polri* [↑](#footnote-ref-38)
39. 36Departement HANKAM MABES POLRI, Himpinan Juklal Juknis *Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana,(Jakarta:1982),* hlm 34.

    37 R.Soesilo,Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea Bogor hlm 241 [↑](#footnote-ref-39)
40. 38Vani Kurnia, Sahuri Lasmadi, Elizabeth Siregar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Kewenangan Jaksa Sebagai Penyidik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”,* Fakultas Hukum, Universitas Jambi, PAMPAS*: Journal Of Criminal*, Volume 1 Nomor 3, 2020. https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/11084 [↑](#footnote-ref-40)
41. 38W. J.S. Poerwadarminta*, Kamus Umum Bahsa Indonesia,* PN Balai Pustaka, Jakarta 1985, Hlm 763. [↑](#footnote-ref-41)
42. 40Berdasarkan Hasil Wawan Cara Bapak Eri Kurniawan S.H.M.H, Sebagai Kepala Bagian Kasat Kum, Dipolres Sarolangun 4 Juli 2022. [↑](#footnote-ref-42)
43. Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Akp Rendi Reanaldy 4 Juli 2022, Polres Sarolangun. [↑](#footnote-ref-43)
44. 42Bapak Erik Kurniwan. S,H,M.H Dan Sekjen Septian Papahan S.H. Sarolangun 4 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-44)
45. 43Hasni Anggota Reskrim, Polres Sarolangun 23 Mei 2023. [↑](#footnote-ref-45)
46. Bapak Akp Rendi Reanaldy S.IK Ketua Bagian Reskrim, Sarolangun 4 Juli 2022 [↑](#footnote-ref-46)